



**ANALISIS KINERJA ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH (SKPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH (BPKAD) KOTA JAMBI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Terapan (S.Tr)

Oleh:
SAYYED AHMAD NAPIZ
C0E021017

**PROGRAM STUDI KEUANGAN DAERAH
JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI**

LEMBAR PERSETUJUAN

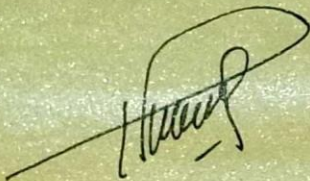
Dengan ini, Pembimbing Tugas Akhir dan Ketua Program Studi, Menyatakan
Bahwa Tugas Akhir yang disusun oleh :

Nama : Sayyed Ahmad Napiz
Nim : C0E021017
Program Studi : Keuangan Daerah
Judul : Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah (BPKAD) Kota Jambi.

Telah disetujui dan disahkan sesuai dengan prosedur, ketentuan dan kelaziman yang
berlaku untuk diuji pada ujian komprehensif dan tugas akhir pada tanggal yang
tertera dibawah ini.

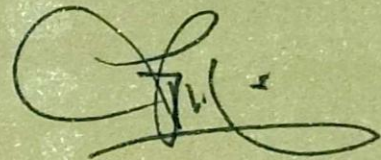
Jambi, Juli 2025

Pembimbing Skripsi I



Prof. Dr. H. Yulmardi, S.E., M.S
NIP.195906041986031002

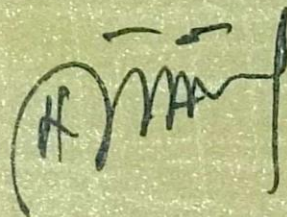
Pembimbing Skripsi II



Parmadi, S.E., M.E
NIP.196805061993032003

Mengetahui,

Ketua Program Studi Keuangan Daerah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



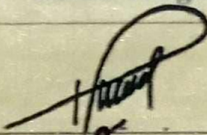
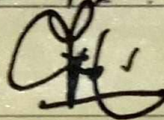
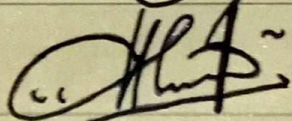
Dr. Nurhayani, S.E., M.Si
NIP.198006212009122002

LEMBAR PENGESAHAN

Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Komprehensif dan Tugas akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi pada:

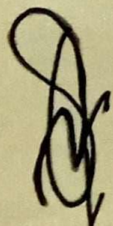
Hari : Kamis
Tanggal : 3 Juli 2025
Jam : 08.30 WIB - Selesai
Tempat : Ruang Sidang Diploma

PANITIA PENGUJI

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Prof.Dr.Yulmardi,S.E.,MS	
Sekretaris	Parmadi S.E.,M.E.	
Anggota	Dra. Hardiani, M.Si	

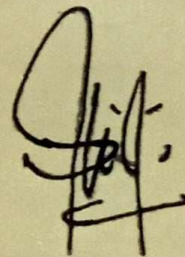
Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis



Prof. Dr. Shofia Amin, SE., M.Si
NIP.196603011990032002

Ketua Jurusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Dr. Rafiqi, MA.
NIP.197802282005011003

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayyed Ahmad Napiz

Nim : C0E021017

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Program Studi : Diploma IV Keuangan Daerah

Judul Skripsi : Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kota Jambi.

Menyatakan dengan jujur bahwa skripsi yang saya buat ini sepenuhnya merupakan hasil kerja saya sendiri dan tidak diambil dari tulisan atau pemikiran orang lain yang saya klaim sebagai karya saya. Jika dimasa depan terbukti skripsi ini plagiat, saya siap menerima konsekuensi dari tindakan tersebut.

Jambi, Juli 2025

Yang membuat pernyataan

Materai 10.000

Sayyed Ahmad Napiz
C0E021017

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunianya penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Anggaran SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi”. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW.

Terkhusus penulis mengucapkan terima kasih kepada orang tua tercinta yaitu panutanku Abah Said Umar, S.Ag dan pintu surgaku Mak Habibah, dua orang yang sangat berjasa dalam hidupku, selalu mengusahakan anak Laki-lakinya ini menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Terima kasih kepada Abahku tercinta atas setiap cucuran keringat dan kerja keras yang menjadi sebuah nafkah demi mendapatkan gelar sarjana untuk anakmu. Kepada Mak terima kasih banyak sudah memberikan semangat, motivasi, masukan, dan juga selalu mendoakan anak Laki-lakinya untuk menjadi seorang yang berpendidikan. Terima kasih atas kasih sayang, kesabaran, pengorbanan dan dukungan sehingga penulis bisa mencapai cita-citanya.

Penyusunan skripsi ini menjadi salah satu syarat yang wajib dipenuhi oleh setiap mahasiswa guna menuntaskan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Terapan (S. Tr) di Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah Universitas Jambi. Dalam proses penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak dukungan dari banyak pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat ingin mengungkapkan kata terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Shofia Amin, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi.
2. Bapak Dr. Rafiqi, MA Selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Jambi.
3. Ibu Dr. Nurhayani, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Diploma IV Keuangan Daerah.
4. Bapak Prof. Dr. H. Yulmardi, S.E., M.S Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Pertama.

5. Bapak Parmadi S.E.,M.E Selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua.
6. Untuk ke 4 adik saya yaitu Syarifah Salwa Labibah, Syarifah Zulfah Chumairoh, Sayyed Abdurrahmad Syagib, Dan adik paling kecil Abang Sayyed Muhammad Syaugi, Semoga adik adik abang bisa mendapatkan gelar seperti abang ya.
7. Terima kasih kepada seorang wanita yang penting akan kehadirannya yaitu Sarifah Suci Sal Sabila. Terimakasih sudah memberi semangat, motivasi, selalu membantu segala kesulitan serta selalu menemani penulis sehingga akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita berdua selalu sukses kedepannya.
8. Terimakasih teman-teman seperjuangan saya selama berkuliah yaitu Squad Manula yang sudah banyak memberikan motivasi ataupun semangat.

Jambi, Juli 2025

Penulis

Sayyed Ahmad Napiz

C0E021017

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi. Yang di bawah bimbingan Bapak Prof.Dr.Yulmardi,S.E.,MS dan Bapak Parmadi S.E.,M.E. Tujuan penelitian ini 1) untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024, 2) untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi, pada anggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif dengan pendekatan analisis rasio keuangan. Data diperoleh dari laporan realisasi anggaran (LRA), dokumen RKA-SKPD, serta laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP). Alat analisis data yang digunakan berdasarkan rasio efektivitas, rasio serapan anggaran belanja, dan rasio efisiensi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa realisasi pendapatan BPKAD Kota Jambi dari tahun 2020–2024 secara umum berada dalam kategori sangat baik hingga baik, dengan persentase tertinggi sebesar 100,26% pada tahun 2020 dan terendah 93,57% pada tahun 2024. Realisasi belanja mengalami fluktuasi dengan rata-rata serapan belanja berada pada kategori cukup hingga baik. Hasil pengukuran kinerja anggaran menunjukkan bahwa rasio efektivitas anggaran tergolong cukup efektif hingga sangat efektif, sementara rasio serapan belanja tergolong cukup baik hingga baik. Namun, rasio efisiensi menunjukkan hasil yang kurang optimal, karena sebagian besar tahun menunjukkan nilai di atas 100%, yang mengindikasikan penggunaan anggaran yang tidak efisien.

Kata Kunci : Kinerja Anggaran, Efektivitas, Efisiensi, Serapan Belanja, BPKAD

ABSTRACT

This study is entitled Analysis of Budget Performance of Regional Work Units (SKPD) at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Jambi City. Under the guidance of Prof. Dr. Yulmardi, S.E., MS and Mr. Parmadi S.E., M.E. The purpose of this study is 1) to determine and analyze the development of the realization of the revenue and expenditure budget from SKPD at the Regional Financial and Asset Management Agency of Jambi City during the 2020-2024 period, 2) to determine and analyze budget performance as seen from the Effectiveness Ratio, Budget Absorption Ratio, and Efficiency Ratio, in the SKPD budget at the Regional Financial and Asset Management Agency of Jambi City during the 2020-2024 period.

The method used in this study is a descriptive quantitative method with a financial ratio analysis approach. Data were obtained from budget realization reports (LRA), RKA-SKPD documents, and government agency performance reports (LKjIP). The data analysis tools used are based on the effectiveness ratio, budget absorption ratio, and efficiency ratio.

The results of the analysis show that the realization of Jambi City BPKAD revenue from 2020–2024 is generally in the very good to good category, with the highest percentage of 100.26% in 2020 and the lowest of 93.57% in 2024. The realization of spending fluctuates with the average spending absorption in the sufficient to good category. The results of the budget performance measurement show that the budget effectiveness ratio is classified as quite effective to very effective, while the spending absorption ratio is classified as quite good to good. However, the efficiency ratio shows less than optimal results, because most years show values above 100%, which indicates inefficient budget use.

*Keywords: Budget Performance, Effectiveness, Efficiency, Expenditure Absorption
BPKAD*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
2.1 Keuangan Daerah.....	7
2.2 Konsep Kinerja Anggaran dan Perhitungannya	14
2.3 Penelitian Terdahulu.....	17
2.4 Kerangka Pemikiran	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis dan Sumber Data	32
3.2 Metode dan Alat Analisis Data.....	32
3.3 Operasional Variabel	36
BAB IV GAMBARAN OBJEK PENELITIAN.....	38
4.1 Sejarah Singkat BPKAD Kota Jambi	38
4.2 Visi dan Misi	38
4.3 Kedudukan.....	40

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	41
4.5 Sturktur Organisasi	41
4.6 Sumber Daya Manusia.....	44
4.7 Standar Pelayanan BPKAD Kota Jambi.....	45
4.8 Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD Pada BPKAD Kota Jambi	46
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	69
5.1 Analisis Data.....	69
5.2 Analisis Kinerja Anggaran Pada BPKAD Kota Jambi Dilihat Dari Rasio Efektivitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja dan Rasio Efisiensi	74
5.3 Analisis Ekonomi	79
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	82
6.1 Kesimpulan.....	82
6.2 Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas	15
Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Efisiensi.....	17
Tabel 3. 1 Kriteria Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan.....	33
Tabel 3. 2 Kriteria Target Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan	33
Tabel 3. 3 Kriteria Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja	34
Tabel 3. 4 Kriteria Target Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja.....	34
Tabel 3. 5 Kriteria Tingkat Rasio Efektivitas	35
Tabel 3. 6 Kriteria Rasio Serapan Anggaran Belanja	35
Tabel 3. 7 Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi.....	36
Tabel 4. 1 Komposisi Pegawai BPKAD Kota Jambi Tahun 2025.....	44
Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020	46
Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021	50
Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran 2022	54
Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022	58
Tabel 4. 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023	62
Tabel 4. 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024.....	66
Tabel 5. 1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD Tahun 2021- 2024	69
Tabel 5. 2 Perkembangan Target Pendapatan BPKAD Tahun 2021-2024.....	70
Tabel 5. 3 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2020-2024	72
Tabel 5. 4 Target Perkembangan Belanja BPKAD Tahun 2021-2024	73
Tabel 5. 5 Analisis Rasio Efektivitas BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024.....	74
Tabel 5. 6 Analisis Rasio Serapan Anggaran Belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024.....	76
Tabel 5. 7 Analisis Rasio Efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi.....	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian.....	87
Lampiran 2 Data Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024.....	88
Lampiran 3 Dokumentasi Selama Penelitian	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berperan penting guna penentuan efektivitas pelaksanaan sejumlah program maupun aktivitas yang direncanakan pemerintahan daerah, dan menjadi perangkat utama dalam pengaturan keuangan wilayah. Selain berfungsi sebagai sarana perencanaan keuangan, anggaran juga berperan sebagai instrumen untuk pengendalian, evaluasi, serta pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan.

Pembiayaan sektor publik menjadi satu diantara aspek memiliki peran signifikan pada penyelenggaraan administrasi negara daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengoptimalkan sumber pendapatan dan mengelola pembiayaan secara optimal guna memastikan kebutuhan belanja daerah dapat terpenuhi tanpa menimbulkan defisit yang berlebihan. Dalam konteks ini, BPKAD memiliki tanggung jawab dalam merancang kebijakan anggaran yang mendukung stabilitas fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Evaluasi terhadap kinerja anggaran SKPD memiliki peran signifikan dalam mengevaluasi tingkat keberhasilan pengelolaan anggaran yang efektif dan ekonomis sebagai upaya strategis untuk mendorong Implementasi program pengembangan wilayah.

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah komponen penting mengatur keuangan daerah dimana mencerminkan kapasitas anggaran serta prioritas pembangunan daerah. Penyusunan APBD melibatkan berbagai tahapan dari perumusan rencana, penetapan anggaran, hingga pelaksanaan program hingga evaluasi. Proses ini, BPKAD berperan dalam mengoordinasikan serta memastikan bahwa alokasi anggaran dilakukan secara tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan Daerah beserta pedoman pengelolaan keuangan yang transparan dan bertanggung jawab.

SKPD pada BPAKD ialah perkiraan total penerimaan yang diharapkan dapat diterima oleh pemerintah daerah melalui anggaran satu tahun. Pada tahun 2020, realisasi anggaran pendapatan daerah tercatat sebesar

Rp1.617.658414.714 dan realisasi nya sebesar Rp.1.621.827.275.396 dengan hasil persentase 100,26%. Namun, pada tahun 2021, terjadi penurunan realisasi anggaran pendapatan mencapai Rp1.658.405.928.034 dan realisasi nya sebesar Rp.1.652.948.449.754 dengan hasil presentase 99,67%. pada tahun 2022, realisasi anggaran pendapatan daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 1.670.844.905.471 dan realisasi nya sebesar Rp.1.668.797.755.118 dengan hasil persentase 99,88%. Namun pada tahun 2023 kembali terjadi nya penurunan pada realisasi anggaran pendapatan sebesar Rp. 1.755.751.906.289 dan realisasinya sebesar Rp. 1.662.743.583.686 dengan hasil persentase sebesar 94,70%. Pada tahun 2024 realisasi anggaran pendapatan mengalami kembali terjadinya penurunan yaitu sebesar Rp. 1.886.534.704.938 dan realisasinya sebesar Rp.1.765.182.353.921 Dengan persentase 93,57%.

Anggaran belanja daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam BPKAD yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Dalam beberapa tahun terakhir, realisasi anggaran belanja daerah menunjukkan perkembangan yang signifikan, pada tahun 2020, anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp 1.826.930.849.781, dengan realisasi mencapai Rp 1.665.932.584.837. Persentase realisasi pada tahun ini tercatat sebesar 91,19%, menunjukkan bahwa hampir seluruh anggaran dapat terealisasi dengan baik. Memasuki tahun 2021, anggaran belanja daerah meningkat menjadi Rp 1.961.694.919.058. Namun, realisasi anggaran mengalami penurunan menjadi Rp 1.740.357.878.019, dengan persentase realisasi sebesar 88,72%. Penurunan ini mengindikasikan tantangan dalam pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Tahun 2022 menunjukkan anggaran yang sedikit menurun menjadi Rp 1.812.832.658.629, dengan realisasi sebesar Rp 1.622.747.432.178 dan persentase realisasi mencapai 89,51%. Meskipun ada penurunan dalam angka nominal, persentase realisasi tetap menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam konteks pengelolaan anggaran. Saat tahun 2023, anggaran belanja daerah kembali mengalami peningkatan jadi Rp 1.863.794.648.856 dengan realisasi mencapai Rp 1.720.255.456.671 dan persentase realisasi sebesar 92,30%. Ini

menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan dan pelaksanaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Terakhir, pada tahun 2024, anggaran ditetapkan sebesar Rp 1.928.586.899.927, dengan realisasi sebesar Rp 1.800.252.368.262 dan persentase realisasi mencapai 93,35%. Peningkatan persentase ini mencerminkan upaya yang lebih baik pada pengelolaan maupun penggunaan anggaran belanja daerah.

Pada tahun 2020, realisasi anggaran pembiayaan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari total anggaran sebesar Rp211.176.919.411, realisasi mencapai Rp211.177.186.101 atau setara dengan 100%, menandakan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai target. Kemudian, saat tahun 2021, realisasi anggaran belanja menurun terkait efektivitasnya. Melalui total anggaran sebesar Rp303.288.991.024, hanya terealisasi sebesar Rp247.088.085.423 atau 81,47%, menunjukkan adanya deviasi yang cukup signifikan dari perencanaan. Pada tahun 2022, realisasi anggaran kembali menunjukkan perbaikan. Dari anggaran sebesar Rp142.087.753.158, realisasi yang dicapai sebesar Rp142.092.419.627 atau 100%, mencerminkan akurasi dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Peningkatan juga terjadi di tahun 2023, dengan realisasi belanja yang melebihi target. Dari anggaran sebesar Rp108.042.742.567, realisasi mencapai Rp109.564.067.973, menghasilkan persentase 101,41%. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dan penyesuaian yang efektif dalam pelaksanaan anggaran. Pada tahun 2024, kinerja anggaran belanja mengalami lonjakan signifikan. Dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp42.052.194.989, realisasi belanja mencapai Rp47.525.060.138 atau 113,01%. Kelebihan ini mencerminkan kebutuhan aktual yang lebih besar dari perencanaan awal, yang direspons dengan penyesuaian anggaran secara adaptif

Dalam penyusunan APBD, anggaran sektor publik menjadi fokus utama dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur. Efektivitas pengelolaan anggaran sektor publik sangat bergantung pada sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola pendapatan dan belanja dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan

akuntabilitas. Maka dari itu, pengkajian terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran SKPD, khususnya BPKAD Kota Jambi, sangat utama dalam penilaian sejauh mana implementasi kebijakan fiskal yang telah diterapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah.

Anggaran SKPD merupakan bagian dari APBD yang secara langsung berkaitan dengan Penerapan tanggung jawab dan peran setiap perangkat daerah. Setiap SKPD, termasuk BPKAD Kota Jambi, bertanggung jawab untuk mengelola anggarannya dengan memperhatikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana. Evaluasi terhadap kinerja anggaran SKPD dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana sumber daya keuangan digunakan serta sejauh mana anggaran yang telah dialokasikan mampu menggapai target yang telah ditentukan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Dalam praktiknya, penataan anggaran SKPD dihadapkan pada beragam kendala, salah satunya adalah terbatasnya sumber daya, ketidaksesuaian antara perencanaan realisasi anggaran, serta adanya risiko inefisiensi dalam penggunaan dana. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme peninjauan dan penilaian secara ketat dilaksanakan guna menjamin bahwa anggaran yang telah disediakan digunakan secara optimal dalam mendukung rencana program dan kegiatan.

Selain itu, dalam konteks hak pengelolaan sendiri oleh daerah diberikan otoritas tinggi untuk mengatur anggaran serta memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Situasi ini memberikan peluang bagi BPKAD Kota Jambi untuk lebih fleksibel dalam merancang kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan wilayah. Akan tetapi, otonomi menuntut tanggung jawab yang lebih besar dalam memastikan bahwa anggaran dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.

Evaluasi kinerja anggaran juga berperan dalam memberikan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap aspek-aspek yang berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan anggaran oleh pemerintah daerah dapat mengidentifikasi

kelemahan dan peluang perbaikan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan ini penting untuk meningkatkan mutu pelayanan masyarakat guna memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, analisis terhadap kinerja anggaran SKPD, khususnya di BPKAD Kota Jambi, menjadi suatu kebutuhan yang mendesak dalam upaya meningkatkan efektivitas serta pengelolaan keuangan daerah yang hemat dan optimal. Dengan memahami pola pengelolaan anggaran serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerjanya, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun langkah-langkah strategis guna memperbaiki kebijakan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan demi tercapainya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan pada penelitian dengan judul **Analisis Kinerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Selama Periode Tahun 2020-2024?
2. Bagaimana Kinerja Anggaran yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi, pada anggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi Selama Periode 2020-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja dari SKPD Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja anggaran yang dilihat dari Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi,

pada anggaran SKPD pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi selama periode 2020-2024

1.4 Manfaat Penelitian

Penemuan riset mampu menghadirkan berbagai manfaat kepada seluruh pihak, khususnya:

1) Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang keuangan daerah, khususnya mengenai analisis kinerja anggaran SKPD berdasarkan rasio efektivitas, efisiensi, dan serapan anggaran belanja. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dan referensi bagi akademisi dan mahasiswa dalam pengembangan teori dan pembelajaran tentang pengelolaan keuangan sektor publik, serta memperluas literatur empiris mengenai evaluasi anggaran pada instansi pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat mendorong penelitian lanjutan yang lebih mendalam terkait pengaruh kebijakan fiskal terhadap pencapaian pembangunan daerah.

2) Manfaat Praktis

hasil penelitian ini dapat digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi sebagai bahan evaluasi dalam menyusun strategi peningkatan efektivitas, efisiensi, dan optimalisasi penyerapan anggaran di tahun-tahun mendatang. Pemerintah daerah juga dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih tepat sasaran, adaptif, dan akuntabel. Selain itu, penelitian ini bermanfaat bagi instansi lain dalam mengevaluasi kinerja anggaran SKPD guna mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Keuangan Daerah

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah ialah bagian dari keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara diartikan sebagai seluruh hak serta tanggung jawab keuangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam rangka mendukung jalannya pemerintahan. pelaksanaan pembangunan di daerah. Hak kewajiban ini dinilai dalam satuan uang, mencakup seluruh jenis harta berhubungan dengan keduanya. Menurut Subianto, (2022) Keuangan daerah adalah keseluruhan aset dan kewajiban finansial dimiliki oleh pemerintah daerah, termasuk sumber daya moneter dan material yang dapat dimanfaatkan untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Secara spesifik, keuangan daerah berkaitan erat dengan perencanaan dan pelaksanaan APBD, yang menjadi landasan utama untuk mengatur keuangan daerah. Dalam konteks ini, keuangan daerah diartikan menjadi segala hak beserta kewajiban pemerintah yang mempunyai nilai moneter, termasuk juga aset baik berbentuk uang ataupun barang yang mampu meningkatkan kekayaan daerah serta entitas lain berdasarkan ketentuan hukum.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, keuangan daerah mencakup segala hal yang berkaitan dengan keuangan yang berhubungan dengan pemerintahan daerah, termasuk hak dan kewajiban daerah yang dapat diukur dengan satuan uang. Penataan finansial wilayah ialah komponen dari subsistem pengelolaan keuangan negara dan termasuk komponen kunci pada pelaksanaan Pemerintah Daerah.

2.1.2 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Pendapat Mardiasmo (2005) dalam Ahmad Mustamir dan Agus Hendrayadi, (2023) dikemukakan anggaran sektor publik ini mempunyai sejumlah fungsi utama, antara lain :

1) Instrumen Penyusunan (*drafting instrument*)

Suatu biaya sangat penting karena instrumen bagi tahap merancang pengelolaan organisasi dalam rangka menggapai target institusional. Berkaitan dengan hal ini anggaran sektor publik disusun sebagai upaya dalam merencanakan berbagai aktivitas atau tindakan tentang Instansi pemerintah akan merumuskan langkah-langkah terkait perkiraan besaran biaya yang diperlukan, serta menghitung perkiraan manfaat atau keluaran yang dihasilkan dari pengeluaran yang dikeluarkan. Dengan demikian, anggaran berperan sebagai instrumen perencanaan yang menggambarkan hubungan antara input (biaya) dan output (hasil) dari suatu belanja pemerintah perlukan :

- a. Menetapkan target dan orientasi kebijakan agar sejalan dengan tujuan dan nilai inti organisasi yang berlaku.
- b. Menyusun strategi untuk aktivitas dan agenda organisasi guna mencapai tujuan, serta mengidentifikasi sumber daya finansial yang dibutuhkan.
- c. Mengalokasikan anggaran untuk aktivitas dan agenda yang direncanakan.
- d. Mengatur tolak ukur kinerja sejauh mana rencana telah berhasil dicapai.

2) Sebagai sarana untuk mengatur atau mengendalikan (*As a means to regulate or control tool*)

Keberadaan dan fungsi Anggaran menyajikan perincian rencana terkait berbagai sumber pendapatan dan jenis belanja daerah, oleh karena itu proses belanja dapat dilaksanakan secara terarah dan sistematis dilakukannya tersebut bisa dipertanggung jawabkan oleh berbagai kalangan masyarakat atau publik. Dalam anggaran ini penting sebagai berbagai Alat pengendalian dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya pengeluaran yang melebihi anggaran (*overspending*) maupun pengeluaran yang kurang dari rencana (*underspending*)." serta menghindari adanya salah sasaran (*misappropriation*) didalam

menggunakan atau penempatan anggaran pada sektor lain, khususnya jika sektor tersebut bukan merupakan fokus utama yang dihadapi. Jadi anggaran sesungguhnya adalah suatu sarana atau pedoman untuk melihat berbagai keuangan serta operasional dari suatu program atau berbagai kegiatan pemerintahan.

Disisi lain anggaran juga sebagai alat pengendalian bagi suatu manajerial. Dalam hal ini anggaran sektor publik sangat penting untuk digunakan secara efektif dan untuk menyakinkan bahwa pemerintah memiliki atau mempunyai anggaran atau finansial yang memadai guna mencukupi tugas yang menjadi tugasnya. Dalam mengatur suatu terdapat empat metode digunakan dalam pengelolaan anggaran public berikut :

- a. Dengan membandingkan antara pencapaian kinerja dan sasaran yang telah ditentukan dalam anggaran.
- b. Dengan cara menghitung bagaimana selisih anggaran (*favourable* dan *unfavourable variances*).
- c. Dengan cara menemukan berbagai faktor-faktor yang bisa diatur (kontrol) juga yang tak bisa diatur (tidak terkendali) yang mempengaruhi suatu varians.
- d. Melakukan penyesuaian terhadap patokan biaya sasaran anggaran tahun mendatang.

3) Instrumen dalam kebijakan fiskal (*Instrument in fiscal policy*)

Anggaran berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh pemerintah menjaga kestabilan perekonomian meningkatkan perkembangan ekonomi. Dengan anggaran publik, haluan kebijakan fiskal pemerintah memungkinkan untuk dievaluasi, yang memungkinkan Perkiraan serta proyeksi ekonomi dilakukan sebagai dasar perencanaan. Anggaran difungsikan untuk mendorong, mendukung, dan menyelaraskan aktivitas ekonomi masyarakat dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Instrumen politik (*political instruments*)

Dalam alokasi dana ini sangat penting karena digunakan untuk memutuskan berbagai prioritas serta untuk berbagai kebutuhan dana untuk memenuhi prioritas-prioritas tersebut. Dalam konteks sektor publik, anggaran adalah dokumen resmi yang memperlihatkan komitmen melalui pihak eksekutif, juga merupakan kesepakatan lembaga legislatif terkait keputusan penggunaan anggaran publik guna menyelesaikan pelayanan masyarakat atau publik.

Secara umum dalam negara konstitusional penyusunan anggaran harus melalui Lembaga perwakilan politik. Hal ini berarti bahwa dalam membuat sebuah anggaran publik harus melalui atau membutuhkan keterampilan politik, diikuti dengan pembangunan koalisi, serta kemampuan dalam bernegosiasi. Selain itu, pemahaman mengenai dasar-dasar prinsip manajemen keuangan sektor publik juga penting dimiliki seluruh manajer publik yang dilakukan melalui strategi yang efektif. Untuk itulah manajer publik perlu siap dan harus sepenuhnya menyadari bahwa ketidakberhasilan dalam melaksanakan anggaran yang telah disepakati dapat berisiko meruntuhkan arahan seseorang, bahkan setidaknya dapat menurunkan kredibilitas lembaga pemerintah.

5) sarana untuk mengatur dan menyampaikan informasi (*means of organizing and conveying information*)

Penyelenggaraan pemerintahan setiap divisi kerja dalam pemerintah senantiasa berperan aktif dalam seluruh tahapan perencanaan hingga pengesahan anggaran. Dengan demikian, alokasi anggaran negara juga berperan ganda sebagai instrumen untuk menjalankan koordinasi unit instansi atau unit kerja dalam pemerintahan. Untuk itu bila anggaran publik ini dapat disusun dengan efektif atau tepat dan baik, maka akan dapat mengidentifikasi adanya atau munculnya suatu ketidaksesuaian dalam beberapa instansi atau unit kerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasinya tersebut. Disisi lain bahwa anggaran publik juga berperan sebagai media atau sarana melakukan proses interaksi antara instansi

atau satuan kerja di dalam tataran eksekutif itu sendiri. Dalam proses penyusunan dan penetapan anggaran harus selalu dikomunikasikan dengan seluruh unit atau bagian organisasi untuk dilaksanakan agar berdaya dan berhasil guna.

6) Sebagai instrumen untuk mengukur kinerja (*As an instrument to measure performance tool*)

Keberadaan suatu anggaran juga adalah suatu wujud adanya perjanjian pihak pemegang anggaran (eksekutif) terutama pada pihak yang berkuasa (Lembaga legislatif). Didalam kinerja Lembaga eksekutif sudah selayaknya akan diawasi dan penilaian dilakukan melalui parameter capaian target anggaran yang telah ditetapkan, disertai analisis tingkat efisiensi dalam implementasi alokasi anggaran tersebut. Didalam kinerja para manajer publik diawasi dan diukur melalui indikator pada seberapa berbagai capaian kinerja yang berhasil kemudian capaiannya tersebut diintegrasikan dengan ketentuan anggaran yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, fungsi anggaran berperan sebagai pedoman serta alat yang efektif dalam mengendalikan dan mengevaluasi kinerja organisasi.

7) Instrumen Motivasi (*motivational instrument*)

Keberadaan anggaran juga berfungsi sebagai pedoman atau sarana dalam mendorong para pihak koordinator serta semua tim kerja sehingga dapat berkoordinasi secara tepat, efektif, serta efisien didalam mencapai sasaran atau target serta tujuan organisasi sebagaimana yang sudah disepakati dalam rencana kerja organisasi. Untuk itu agar bisa menginspirasi tenaga kerja, Anggaran hendaknya disusun dengan tingkat tantangan yang tinggi, namun tetap dapat dicapai secara realistis. Dengan kata lain, target anggaran tidak boleh terlalu tinggi hingga sukar dipenuhi, tetapi tidak boleh terlalu rendah kemudian dapat dicapai tanpa usaha yang berarti dan menghindari kesalahan atau tidak selaras dengan ketentuan.

8) Sebagai instrumen dalam menciptakan ruang publik (*As an instrument in creating public space*)

Pada anggaran publik hal yang harus diperhatikan adalah pentingnya sinergitas berbagai pihak seperti berbagai unsur Pemerintahan seperti Pemerintah, aparat birokrasi, serta legislatif, masyarakat, dan organisasi non-pemerintah (LSM). Lembaga Universitas, serta berbagai organisasi sosial atau pemangku kepentingan yang harus berpartisipasi dalam proses penganggaran politik. Adanya berbagai komunitas atau komunitas bekerjasama yang umumnya akan berupaya memberikan dampak pada anggaran pemerintah dalam rangka memenuhi keinginan mereka terutama untuk pembanguna nasional. Adapun kelompok masyarakat lainnya jika tidak terstruktur dengan baik biasanya Menyalurkan aspirasinya melalui proses politik yang ada. Komunitas pengangguran, kemudian tunawisma, serta kelompok lain umumnya tidak terorganisir, cenderung dengan mudah dan tanpa daya mengikuti langkah-langkah atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Jadi saluran atau media untuk menyuarakan aspirasi mereka tersebut, mereka biasanya akan bertindak dengan cara lain, seperti melalui aksi massa, melakukan boikot, bahkan ada yang melakukan vandalisme, dan tindakan lainnya.

2.1.3 Komponen Anggaran SKPD

Anggaran dalam SKPD merupakan instrumen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang berfungsi untuk memastikan penyusunan dan penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien dan transparan. Komponen anggaran dalam SKPD meliputi beberapa hal yang saling terkait, yaitu:

1) Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah ialah mengukur seberapa mandiri pemerintah daerah secara keuangan ialah melihat semua uang yang mereka terima, baik dari PAD atau dana perimbangan selayaknya dana transfer khusus dari pemerintah pusat juga dana transfer umum Hutagaol, (2023).

Pendapatan daerah merujuk pada seluruh penerimaan yang sah Penerimaan daerah disahkan oleh pemda, berasal dari multi-sumber pendanaan, digunakan sebagai modal penyelenggaraan pemerintahan dan percepatan pembangunan regional. Ini merupakan hak pemerintah daerah untuk memperoleh dana yang akan menambah kekayaan bersihnya.

Sumber pendapatan daerah sangat beragam, termasuk pajak daerah, retribusi, hibah, dan dana perimbangan, yang semuanya berkontribusi pada penerimaan daerah dalam kerangka desentralisas. Pendapatan yang besar oleh suatu daerah menunjukkan kemandirian fiskal yang lebih baik dalam pelaksanaan desentralisasi, yang didukung oleh sumber-sumber pendapatan seperti PAD, Dana Perimbangan, Hibah.

2) Belanja Daerah

Pengeluaran daerah komponen pembiayaan yang dialokasikan berdasarkan prinsip pemerataan untuk menjamin aksesibilitas seluruh kelompok sosial secara inklusif, khususnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Alokasi belanja daerah yang efektif dan sasaran dapat memacu pertumbuhan positif dan mengangkat tingkat kesejahteraan penduduk. Pengeluaran daerah meliputi jenis pengeluaran yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. yang digunakan membiayai kegiatan program pembangunan dikelola oleh SKPD. Pembagian belanja dalam SKPD bisa dibedakan menjadi belanja operasional, belanja modal, dan belanja lainnya.

Belanja daerah meliputi seluruh realisasi pengeluaran kas pemerintah daerah yang berdampak pada penurunan ekuitas dana dan merupakan beban daerah dalam periode fiskal tertentu, bersifat *irreversibel*. Secara struktural, belanja daerah terklasifikasi menjadi belanja operasional dan belanja modal. Belanja langsung berhubungan dengan aktivitas pemerintah yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti penyediaan barang, jasa, dan fasilitas publik melalui program-program pemerintah. Sementara itu, belanja tidak langsung bersifat operasional dan tidak terkait langsung dengan masyarakat.

3) Pembiayaan

Pembiayaan daerah digunakan untuk menutupi kekurangan anggaran jika pendapatan tidak mencukupi untuk belanja yang telah direncanakan. Ini dapat mencakup penerimaan pembiayaan seperti pinjaman daerah atau pengeluaran pembiayaan seperti pembayaran utang. Pembiayaan adalah strategi dana yang dialokasikan oleh satu hubungan antar pihak menunjang penanaman modal yang sudah disusun sebelumnya, baik dengan keterlibatan langsung maupun melalui lembaga perantara.

Pembiayaan merujuk pada alokasi Anggaran yang dialokasikan untuk menunjang investasi yang telah dirancang demi tercapainya sasaran yang ditetapkan. Pendanaan menjadi salah satu unsur penting dalam menunjang pelaksanaan program. Penting yang berperan tanpa perantara. berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sektor pendidikan.

2.2 Konsep Kinerja Anggaran dan Perhitungannya

Konsep Kinerja Anggaran adalah pendekatan yang mengaitkan antara alokasi anggaran beserta hasil atau kinerja yang ingin dicapai. Tujuan pokoknya ialah menjamin bahwa pemanfaatan anggaran secara tepat dan efisien menjadi faktor krusial dalam meraih sasaran yang diharapkan.

organisasi atau pemerintah daerah. Dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi, anggaran dapat digunakan dalam rangka meraih hasil terbaik dan mendukung.

1) Rasio Efektifitas

Efektivitas merujuk pada tujuan mencapai tingkat keberhasilan yang ditentukan dapat tercapai dengan sempurna Iin Ivanda Listari et al., (2022) Dalam hal ini, apabila tujuan-tujuan tersebut berhasil dicapai sesuai dengan rencana awal yang telah disusun secara matang, maka tujuan-tujuan tersebut dapat dianggap telah tercapai secara efektif.

Analisis efektivitas adalah suatu keadaan yang menjelaskan sejauh mana pencapaian realisasi anggaran yang sudah tercapai dibandingkan beserta anggaran yang sudah dialokasikan, atau penggunaan anggaran yang sudah terealisasi dibandingkan dengan anggaran yang telah ditargetkan Dharmawan et al., (2021). Berdasarkan Maidar, Rosalia (2022), efektifitas Pengukuran dengan memperbandingkan realisasi dan anggaran yang sudah ditentukan beserta mempergunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 2. 1 Kriteria Tingkat Efektivitas

Kriteria efektivitas	Persentase (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	100
Cukup efektif	90-99
Kurang Efektif	76-89
Tidak Efektif	<75

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane,(2024)

2) Rasio Efisiensi

Efisiensi adalah pemanfaatan sumber daya ekonomi dengan optimal guna menggapai hasil secara maksimal. Hal ini mempunyai arti bahwa dengan sumber daya Menghasilkan output yang maksimal atau semakin

baik. Efisiensi terkait dengan hubungan antara output dan input, serta dapat diukur melalui rasio pengukuran efisiensi berdasarkan selisih antara biaya dan pendapatan yang diterima.

Rasio efisiensi adalah perbandingan yang mengukur seberapa efektif suatu entitas, seperti pemerintah daerah atau perusahaan, dalam memanfaatkan sumber dayanya untuk menghasilkan output atau mencapai hasil tertentu. Rasio ini menunjukkan perbandingan antarajumlah biaya atau pengeluaran yang digunakan guna memperoleh pendapatan dengan capaian penerimaan yang diperoleh Susanto (2019).

Analisis efisiensi adalah sarana untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan pendapatan. Penilaian ini dianggap efisien jika tingkat pencapaiannya kurang dari seratus persen. Pemerintah daerah mempunyai kemampuan mengelola kekayaan serta anggaran dengan baik. tanpa mencapai atau melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan Panimba & Lintin, (2023).

Menurut Halim dan Samosir dalam jurnal Medindari et al. (2024), Analisis Efisien merupakan Pemerintah daerah dianggap efisien dalam pemungutan pendapatan apabila rasio biaya kurang melalui satu maupun dibawah 100%, yang berarti sumber daya digunakan secara optimal. Semakin rendah rasio, semakin baik kinerja pemerintah daerah, karena menunjukkan kemampuan mengelola sumber daya dengan efisien yang telah ditetapkan tanpa harus melakukan pemborosan sumber daya atau menggunakannya terlalu banyak. Mengacu dari Maidar, Rosalia (2022), efisiensi anggaran diukur melalui perbandingan antara realisasi belanja langsung beserta keseluruhan realisasi belanja, menggunakan formula tertentu.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja SKPD}}{\text{Realisasi Pendapatan SKPD}} \times 100\%$$

Tabel 2. 2 Kriteria Tingkat Efisiensi

Kriteria efisiensi	Persentase (%)
Tidak efisien	>100
Kurang Efisien	90 - 100
Cukup efisien	81 - 89
Efisien	61-80
Sangat Efisien	<60

Sumber : (Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, 2024)

2.3 Penelitian Terdahulu

Selaku acuan penelitian, berikut sejumlah penelitian serupa yang dilakukan peneliti terdahulu :

Penelitian Rahmah et al., (2017) yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Penelitian ini menggunakan data sekunder seperti dokumen APBK, peraturan perubahan APBK, dan laporan pertanggung jawaban. Analisis deskriptif digunakan untuk mengkaji hubungan penyerapan anggaran dengan kinerja. Hasilnya menyatakan bahwasanya penyerapan anggaran tinggi berdampak pada kinerja anggaran yang lebih baik, begitu pula sebaliknya Persentase paling tinggi tahun 2013-2015 adalah 99,50%, presentase paling rendah 86,66% Dinas Pemuda dan Olah Raga, 86,46% Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, 88,81%, Dinas Pengairan, Pertambangan, dan 80,47%. Energi dan Kantor Pemberdayaan dan Pendidikan.

Mengacu pada hasil penelitian dari Anggraeni & Saleh, (2020) yang berjudul Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung). Penelitian ini ialah penelitin kuantitatif mempergunakan teknik *purposive sampling*. Hasilnya bahwa pelaksanaan anggaran mempunyai dampak yang positif pada akuntabilitas pemerintah Kota Bandung, berjumlah 61,7%. selebihnya, 38,3%, dikarenakan oleh faktor lain di luar penelitian ini.

Mengacu pada hasil penelitian melalui Ilmiah et al., (2020) dengan judul Analisis Kinerja Anggaran Berkonsep *Value for Money*. Penelitian ini mempergunakan analisis regresi linier berganda dengan 5% pada tingkat signifikansi. Hasil uji parsial mendapatkan variabel transparansi serta pengawasan mempunyai dampak pada kinerja anggaran dari tingkat signifikansi masing-masing 0,026 dan 0,010. Sementara itu, variabel akuntabilitas tidak menunjukkan pengaruh signifikan 0,050 dan 0,293. Penelitian ini memiliki hambatan pada sampel. Penelitian ini memperlihatkan bahwasanya konsep *Value For Money* (VFM) memberi pengaruh sebesar 13,5% terhadap kinerja anggaran ASN pada penyusunan Keuangan, 86,5% sisanya berdampak pada faktor lainnya. Bagi penelitian berikutnya, diberi saran guna penambahan sampel masyarakat dan variabel lainnya yang relevan untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif terkait kinerja anggaran berbasis VFM.

Mengacu pada hasil penelitian melalui April et al., (2018) dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran Berkonsep *Value For Money*. Peneliti menggunakan kuesioner. Seluruh masyarakat yang terdiri dari 57 sampel penelitian. Dengan ini menunjukkan bahwa rasio realisasi anggaran Kota Bandung tahun 2016 mencapai 102,55%, meningkat dibandingkan tahun 2015. Namun, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan menurun dari 93,45% saat tahun 2015 jadi 85,05% saat tahun 2016, menunjukkan penurunan efisiensi juga efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Mengacu pada hasil penelitian dari Manurung & Mauliddina, (2021) dengan judul Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini mempergunakan Metode metode deskriptif juga metode deduktif. Hasilnya simpulkan bahwasanya anggaran keuangan secara keseluruhan tidak dapat dilaksanakan penyusunan anggaran kadang mengalami ketidaksesuaian pada rencana awal, baik karena faktor perencanaan maupun pelaksanaan. Namun, hal ini tidak berdampak

negatif pada keuangan dinas karena kelebihan anggaran akan menjadi sisa anggaran yang masuk ke kas daerah.

Mengacu pada hasil penelitian dari Angelia et al., (2022) yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Batu Bara *Analysis of the Performance Budget Performance System Implementation at the Regional Secretariat of Batu Bara Regency*. Metode yang dipakai yaitu metode kualitatif adanya permasalahan bersifat kompleks, holistik, serta dinamis, sehingga sesuai untuk memahami situasi sosial yang kaya makna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Sistem Kinerja Anggaran memiliki beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Dari segi komunikasi, implementasi sudah berjalan baik dengan komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait. Namun, dari Sumber Daya Manusia (SDM), masih terdapat kekurangan dalam menjalankan sistem kinerja anggaran karena kurangnya pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Meskipun SKPD telah menunjukkan sikap yang baik dalam disposisi, struktur birokrasi masih belum optimal, terutama dalam penyusunan anggaran. Hambatan utama adalah kurangnya pemahaman mendalam tentang penyusunan anggaran,, serta kurangnya perjanjian dalam melaksanakan kegiatan tersebut secara konsisten. Dengan demikian, meningkatnya jumlah SDM serta komitmen diperlukan untuk memperbaiki implementasi sistem kinerja anggaran dan mendukung pemerintahan yang efektif.

Mengacu pada hasil penelitian dari Davananda, S. A. Z. (2023) dengan judul Pengaruh Pengawasan, Akuntabilitas, Dan Transparansi Keuangan Terhadap Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penggunaan metode penelitian tersebut yakni metode kuantitatif mempergunakan data primer berjumlah 70 perwakilan bidang keuangan pada 10 (SKPD) pada Kabupaten Brebes. Tahap *purposive sampling* dipergunakan dalam pemilihan sampel yang relevan dengan penelitian. Data diolah menggunakan IBM SPSS Statistic 22 dengan metode analisis yang mencakup analisis deskriptif, uji hipotesis serta uji asumsi klasik, regresi linier berganda. Hasilnya bahwasanya pengawasan, transparansi,

dan akuntabilitas keuangan berdampak pada kinerja anggaran Kabupaten Brebes. Pengawasan membantu mengendalikan serta menilai penyusunan anggaran untuk menghindari dampak, sehingga dapat terlaksana dengan baik. Akuntabilitas memungkinkan kewajiban pada mengelola anggaran, dengan itu kinerja bisa berdampak positif bagi berbagai pihak internal dan pihak eksternal. Sementara itu, keterbukaan keuangan memperoleh informasi yang benar berkaitan dengan manfaat, hasil, sasaran, maupun tujuan program atau aktivitas yang telah sebagai anggaran, sehingga publik dapat memahami dan menilai kinerja anggaran dengan lebih baik.

Mengacu pada hasil penelitian dari Hadisaputra, (2021) yang berjudul Analisis Kinerja Anggaran Belanja pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau Tahun 2017-2020. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh kinerja anggaran belanja pada Tahun 2017-2020. Penelitian ini mempergunakan teknik observasi, studi kepustakaan, juga dokumentasi. Penggunaan analisis data ini ialah deskriptif kuantitatif. Disimpulkan bahwasanya anggaran kinerja belanja daerah tahun 2017-2020 menunjukkan beberapa temuan penting. Penggunaan belanja operasi meningkat secara signifikan, dengan persentase 89,77% pada tahun 2017, 85,51%, tahun 2018, 88,84% tahun 2019, dan tahun 2020 berjumlah 97,95%. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan belanja daerah lebih dioptimalkan dalam kurun waktu tersebut. Namun, belanja modal menunjukkan tren yang menurun, dengan persentase 5,20% pada tahun 2017, 8,24% pada tahun 2018, 1,73% pada tahun 2019, dan 0,49% pada tahun 2020, yang mengindikasikan adanya keserasian dalam alokasi belanja. Sementara itu, rasio efisiensi belanja menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah masih kurang efisien, dengan persentase 94,97% pada tahun 2017, 95,69% pada tahun 2018, 104,15% pada tahun 2019 (yang menunjukkan tingkat ketidak efisienan yang signifikan), dan 98,44% pada tahun 2020.

Mengacu pada hasil penelitian dari Wirawati et al., (2023) yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2020-2022.

Metode yang digunakan ialah metode kuantitatif tujuannya untuk melihat hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Data primer diperoleh melalui pembagian kuesioner kepada 36 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling dari 6 satuan kerja dengan anggaran APBD terbesar. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linier berganda menggunakan software SPSS 16.0. hasilnya menunjukkan bahwa variabel perencanaan berdampak baik pada penyerapan anggaran secara parsial. Namun, variabel pengadaan barang dan jasa, serta penggunaan teknologi tidak berdampak signifikan pada penyerapan anggaran.

Mengacu pada hasil penelitian dari Ginting & Parwati, (2025) yang berjudul Analisis Anggaran Gaji dan Tunjangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Studi Kasus : Kantor Kecamatan Bandung Kidul. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode analisis Komparatif. Perbandingan anggaran gaji dan tunjangan dengan menggunakan perhitungan rasio efisiensi belanja dapat disimpulkan bahwa perbandingan selama tahun 2012 sampai tahun 2016 dinilai baik karena resesi lebih kecil dari jumlah yang dianggarkan. rata-rata presentasi dengan menggunakan perhitungan efisiensi berada pada angka persentase 90%. Banyak tidak langsung atau pegawai selama tahun 2012 sampai tahun 2016, secara umum terdapat selisih anggaran belanja bersaldo negatif. Hal ini mengindikasikan adanya efisiensi atau penghematan anggaran pada setiap tahunnya. Jumlah penghematan tersebut jika dilihat dari persentasenya memang tidak begitu besar, namun jika dilihat dari nominalnya cukup signifikan begitu juga alasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya selisih anggaran dan realisasi tersebut cukup beralasan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, kinerja keuangan dalam penilaian anggaran gaji dan tunjangan dapat dikatakan baik, karena pada penetapan anggaran sampai pada saat perealisasi prestasi yang tidak terlihat adanya kendala dan kegiatan sudah sesuai dengan peraturan kinerja pemerintah daerah.

Mengacu pada hasil penelitian dari Cendra, (2025) yang berjudul Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun

Anggaran 2021-2023. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan melakukan pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah BPKPD (Badan Pengelolaan Keuangan dan pendapatan Daerah) tahun Anggaran 2021 –2023. Hasil perhitungan beberapa rasio untuk melihat Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023 maka Kabupaten Kepulauan Anambas masih memiliki kemandirian fiskal yang sangat rendah dengan RKKD di bawah 5% Ketergantungan yang tinggi terhadap Pendapatan Transfer membuat keuangan daerah rentan terhadap kebijakan fiskal pusat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi yang signifikan pada rasio efisiensi PAD selama periode 2021-2023, perbaikan yang terlihat pada tahun 2023 memberikan harapan bahwa langkah-langkah evaluasi dan penyesuaian operasional dapat membawa peningkatan dalam pengelolaan keuangan daerah. Monitoring dan penyesuaian yang berkelanjutan menjadi kunci untuk mempertahankan efisiensi dalam pengumpulan PAD dan mendukung kemandirian fiskal yang lebih baik. Pertumbuhan pendapatan daerah dari 2020 hingga 2023 tergolong rendah. Peningkatan yang terjadi pada periode 2022–2023, meskipun positif, masih belum mencapai ambang minimal untuk kategori sedang. Terutama, kinerja PAD yang stagnan dan penurunan pada periode tertentu menunjukkan perlunya strategi yang lebih agresif dalam pengumpulan pendapatan asli daerah.

Mengacu pada hasil penelitian dari Ratu & Adityaputra, (2015) yang berjudul Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bogor Tahun 2019-2023. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari website Pemerintah Kota Bogor, yaitu <https://ppid.kotabogor.go.id>. Analisis dilakukan berdasarkan perhitungan tujuh rasio, yaitu rasio kemandirian, ketergantungan, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023,

rasio kemandirian daerah Pemerintah Kota Bogor menunjukkan kriteria “sedang” dengan rata-rata 71,41% yang menandakan bahwa Kota Bogor belum sepenuhnya mandiri dalam pengelolaan keuangan meskipun mengalami kemajuan. Rasio ketergantungan yang sangat tinggi mencapai 56,84% pada sumber pendapatan luar daerah. Sementara itu, efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat efektif yaitu mencapai 106,95% yang mencerminkan adanya keberhasilan dalam memaksimalkan sumber pendapatan meskipun rasio efisiensi berada pada angka 100,88% sehingga hal ini menunjukkan adanya ketidakefektifan dalam pengelolaan anggaran. Pertumbuhan pendapatan yang positif mencapai 5,11% dan varians anggaranyang mencapai 100,39% menunjukkan pengelolaan yang cukup baik. Derajat desentralisasi yang mencapai 40,51% mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Mengacu pada hasil penelitian dari Kopong et al., (2025) dengan judul Analisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Provinsi Papua Tengah sangat signifikan dalam menjamin terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan. APIP berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang independen, yang berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Kinerja APIP yang optimal memberikan dampak positif terhadap peningkatan sistem tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Adapun faktor-faktor yang mendukung kinerja APIP meliputi ketersediaan anggaran, sumber daya manusia yang memadai, fasilitas pendukung, komitmen dari pimpinan, serta pemberian tunjangan dan sarana kerja yang layak. Sementara itu, hambatan yang memengaruhi kinerja APIP mencakup rendahnya kompetensi sumber daya manusia, lemahnya budaya organisasi, kurangnya motivasi kerja, serta

terbatasnya jumlah auditor, yang secara keseluruhan berdampak pada efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan.

Mengacu pada hasil penelitian dari Widodo et al., (2025) dengan judul Analisis Laporan Realisasi Anggaran untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Berdasarkan hasil analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada periode tahun 2021 hingga 2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai kinerja keuangan daerah. Secara umum, rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada tahun 2021, efektivitas PAD tercatat sebesar 92,09% dan berada pada kategori “cukup efektif”, yang mengindikasikan bahwa pendapatan yang direalisasikan hampir mendekati target meskipun belum optimal. Dan tahun 2022 menunjukkan adanya penurunan pada kinerja dengan nilai efektivitas sebesar 81,94% untuk itu dapat dikategorikan “kurang efektif”, yang mencerminkan adanya hambatan dalam pencapaian target PAD. Namun, pada tahun 2023 mencatatkan adanya peningkatan yang signifikan dengan nilai efektivitas sebesar 101,44%, dapat dikategorikan sebagai “sangat efektif”, yang menunjukkan bahwa realisasi PAD melampaui target yang ditetapkan. Kinerja ini mencerminkan keberhasilan strategi pengelolaan dan pemungutan PAD pada tahun tersebut. Namun demikian, dari sisi efisiensi pengeluaran daerah, kinerja selama tiga tahun berturut-turut belum menunjukkan signifikan. Rasio efisiensi belanja daerah tercatat sebesar 93,98% pada tahun 2021, meningkat menjadi 96,40% pada tahun 2022, dan sedikit menurun menjadi 93,96% pada tahun 2023. Ketiganya masih berada pada kategori “kurang efisien”, yang menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk mendukung operasional pemerintah dan pembangunan daerah masih tergolong tinggi dibandingkan pendapatan yang diperoleh. Hal ini mengindikasikan adanya potensi pemborosan atau belum optimalnya pada penggunaan anggaran. serta perlunya pengendalian yang lebih ketat lagi terhadap aktivitas belanja.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka adanya beberapa saran strategis dapat diberikan sebagai berikut. Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap pola belanja yang selama ini telah dilakukan, dengan menekankan pada efisiensi dan efektivitas program yang didanai melalui APBD. Optimalisasi penganggaran berbasis kinerja dan hasil (*performance-based budgeting*) dapat menjadi solusi untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan pelayanan publik. Kedua, perlu dilakukannya peningkatan kualitas pengelolaan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan, peningkatan kapasitas aparatur, serta pembenahan regulasi yang mendukung optimalisasi penerimaan daerah. Ketiga, pengawasan dan kontrol internal terhadap pelaksanaan anggaran perlu diperkuat dengan melibatkan Inspektorat Daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta partisipasi publik melalui mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Terakhir, penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup yang hanya mencakup tiga indikator keuangan utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal. Oleh karena itu, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambah indikator analisis, seperti rasio pertumbuhan, rasio keserasian, serta membandingkan kinerja antar provinsi guna untuk memperoleh gambaran yang lebih luas dan komprehensif tentang kinerja keuangan pemerintah daerah.

Mengacu pada hasil penelitian dari Miharto et al., (2025) yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengelolaan Anggaran di mediasi Pengendalian Anggaran (Studi Kasus pada UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif Deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran berbasis kinerja pada UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Tengah tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran apabila dikaitkan melalui variabel intervening berupa pengendalian anggaran. Hal ini disebabkan oleh lemahnya hubungan

antara proses perencanaan dan fungsi pengendalian anggaran. Namun demikian, perencanaan anggaran tetap memiliki dampak langsung yang signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran, yang menunjukkan bahwa penyusunan rencana anggaran yang tepat sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran. Di sisi lain, pelaksanaan anggaran berbasis kinerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pengelola anggaran melalui pengendalian anggaran. Pendekatan pelaksanaan yang menitikberatkan pada hasil mendorong penguatan mekanisme pengendalian, yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja pengelolaan anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa implementasi prinsip-prinsip berbasis kinerja dalam proses pelaksanaan anggaran, baik secara langsung maupun melalui pengendalian, berkontribusi terhadap terciptanya pengelolaan anggaran yang lebih optimal.

Mengacu pada hasil penelitian dari K et al., (2025) yang berjudul Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Berdasarkan uraian sebelumnya terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), hasil analisis menunjukkan bahwa kinerja belanja pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencerminkan adanya perbedaan yang cukup signifikan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi anggaran, dengan selisih sebesar 338.089.335. Selain itu, rasio belanja operasional mencapai 98,08%, yang dinilai tidak optimal atau kurang baik. Walaupun terdapat selisih anggaran yang bersifat positif, hal ini tetap menandakan perlunya perhatian lebih dalam pengalokasian belanja daerah, agar seluruh aspek pembangunan dapat terakomodasi secara menyeluruh. Melalui evaluasi yang mendalam dan perencanaan anggaran yang lebih terarah, belanja daerah diharapkan dapat dilakukan secara lebih efisien dan efektif, guna menunjang terwujudnya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Mengacu pada hasil penelitian dari Wenda et al., (2025) yang berjudul Analisis Kinerja Pemerintah Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini

adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kinerja Pemerintah Distrik Kemu dalam menjalankan urusan otonomi daerah, jika ditinjau dari indikator produktivitas, menunjukkan pencapaian program yang telah dirancang melalui pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menekankan pada prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya organisasi. Efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dirancang. Dalam praktiknya, tingkat efektivitas kinerja Pemerintah Distrik Kemu dinilai cukup baik dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan. Sementara itu, efisiensi menggambarkan perbandingan antara output yang dihasilkan dan input yang digunakan, di mana suatu program dianggap efisien apabila target tercapai dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Efisiensi dari program dan kegiatan yang dirancang juga tergolong cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal penyerapan anggaran, pemanfaatan fasilitas kerja, serta pemaksimalan potensi sumber daya manusia aparatur dalam mendukung pelaksanaan program. Selanjutnya, berdasarkan indikator responsivitas, kinerja Pemerintah Distrik Kemu menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam merespons kebutuhan serta kepentingan masyarakat. Program dan kegiatan yang dilaksanakan secara umum telah mengakomodasi persoalan nyata yang terjadi di wilayah distrik, serta sejalan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Pemerintah distrik juga dinilai cukup responsif dalam menangani isu-isu masyarakat yang relevan dengan tugas dan kewenangannya, termasuk dalam merespons dinamika internal dan eksternal yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan otonomi daerah.

Mengacu pada hasil penelitian dari Zikriani & Nurabiah, (2025) yang berjudul Analisis Kinerja Pemungutan Dan Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menganalisis tingkat keberhasilan pemungutan atau tingkat efektivitas pajak daerah dan retribusi daerah yang ada di kabupaten Lombok Tengah

selama 3 tahun terakhir. Berdasarkan hasil penelitian dan uraian diatas, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan pajak daerah Kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021 – 2023 dapat disimpulkan bahwa efektivitasnya termasuk dalam kriteria tidak efektif dengan tingkat rata rata keberhasilan pajak sebesar 74,225%. Berdasarkan hal ini badan keuangan Kabupaten Lombok Tengah Tidak Berhasil dalam memungut pajak daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Kendala yang menyebabkan ketidak berhasilan ini dimungkinkan adanya kebocoran pendapatan, insentif pemungutan tidak sesuai dan rendahnya realisasi dari para wajib pajak yang ada di Lombok tengah. Efektivitas atau tingkat keberhasilan pemungutan retribusi daerah kabupaten Lombok Tengah secara umum atau keseluruhan selama 3 tahun terakhir yakni tahun 2021-2023 dapat disimpulkan bahwa rata rata keberhasilan retribusi sebesar 59,41%. Berdasarkan hal ini Badan Keuangan Kabupaten Lombok Tengah dikatakan Tidak berhasil dalam memungut retribusi daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini disebabkan karena dalam pengelompokan retribusi terdapat berbagai macam jenis retribusi serta pengelolaannya dilakukan oleh beberapa SKPD di Kabupaten Lombok Tengah sehingga terdapat berbagai macam faktor atau penyebab yang mempengaruhi pencapaian target retribusinya.

Mengacu pada hasil penelitian dari Tamasoleng, (2025) yang berjudul Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif . Hasil penelitian mengindikasikan bahwa meskipun pimpinan dan staf di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro telah memahami konsep anggaran berbasis kinerja, namun pada praktiknya, mulai dari tahap perencanaan seperti penyusunan rencana strategis, rencana kerja program dan kegiatan hingga pelaksanaan, pelaporan/pertanggungjawaban, dan evaluasi kinerja, belum sepenuhnya dijalankan sesuai dengan prinsip dan teori anggaran berbasis kinerja. Beberapa hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya ketersediaan data dan informasi baik finansial

maupun non-finansial, kurang jelasnya penentuan skala prioritas, tidak seragamnya metode pengukuran kinerja, indikator kinerja yang belum terdefinisi secara jelas, keterbatasan dana, rendahnya komitmen, masih adanya intervensi politik, serta belum optimalnya sistem akuntansi dan sistem informasi berbasis teknologi informasi.

Pada penelitian terdahulu sebelumnya adapun perbedaan beserta penelitian ini yakni, tempat dan waktu penelitian yang penulis ambil dari Pulau Sumatra tepatnya Kota Jambi dan waktu yang di ambil pada tahun 2025 , yang dimana rata-rata penelitian di atas banyak di ambil dari Pulau Jawa dan waktu penelitian yang sudah cukup lama. Metode kuantitatif dipergunakan dalam penelitian ini, banyak peneliti sebelumnya juga mengambil penelitian seperti metode kualitatif, metode deskriptif, dan metode deduktif. Dan yang membedakan juga penelitian sebelumnya dengan penulis ambil dengan menggunakan alat analisis rasio efektivitas, rasio efisiensi dan rasio serapan anggaran belanja. Dalam penelitian sebelumnya banyak yang memakai analisis regresi linier berganda. Juga berbeda pada operasional variabel penulis lebih berfokus pada, anggaran SKPD, Anggaran Belanja SKPD, dan Anggaran Pembiayaan SKPD pada tahun Anggaran 2020-2024.

2.4 Kerangka Pemikiran

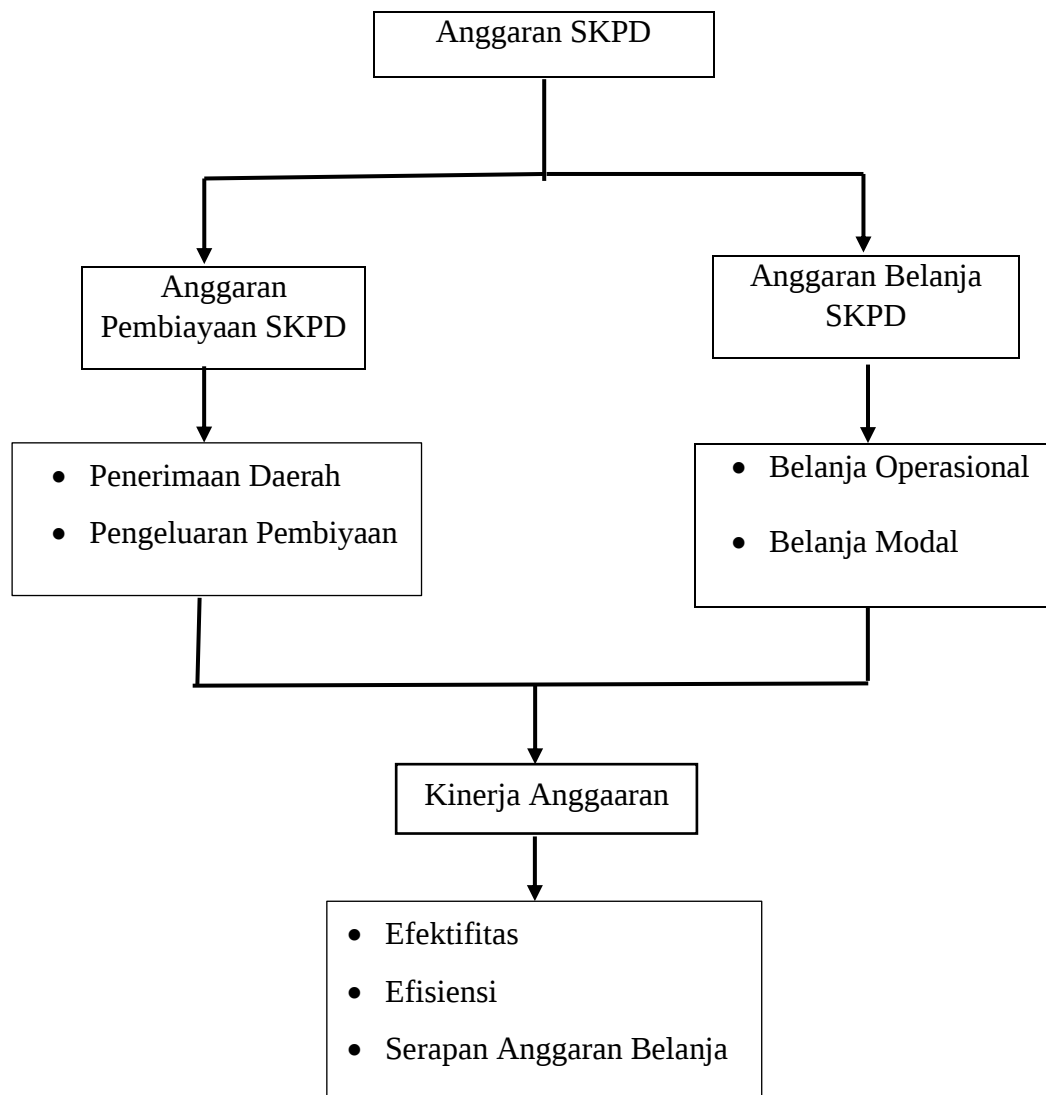
Anggaran SKPD sebagai dasar perencanaan Anggaran SKPD merupakan inti dari kerangka berpikir ini, yang berfungsi sebagai dasar perencanaan keuangan untuk setiap (SKPD). Anggaran ini mencakup dua komponen utama, Anggaran Pembiayaan SKPD dan Anggaran Belanja SKPD. Kedua komponen ini saling melengkapi dalam mendukung operasional dan proyek pembangunan daerah.

Anggaran Pembiayaan SKPD, Komponen ini mencakup atas, Penerimaan Daerah keuntungan yang bersumber melalui pajak dan retribusi daerah, dana perimbangan, dan keuntungan lainnya. Penerimaan ini menjadi sumber utama pembiayaan kegiatan SKPD. Pengeluaran Pembiayaan seperti pembayaran utang daerah atau investasi pemerintah. Pengeluaran ini bertujuan

untuk mendukung keberlanjutan finansial daerah dan memastikan pengelolaan keuangan yang sehat.

Anggaran Belanja SKPD, Anggaran belanja dibagi menjadi dua kategori yaitu, belanja Operasional yaitu pengeluaran untuk kegiatan rutin seperti gaji pegawai, pemeliharaan aset, dan kebutuhan sehari-hari. Belanja Modal, yang digunakan untuk pengadaan aset atau pembangunan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang, efisiensi dalam belanja modal sangat penting untuk menghindari pemborosan anggaran.

Kinerja Anggaran Kinerja anggaran merupakan hasil dari pelaksanaan anggaran pembiayaan dan belanja yang dievaluasi melalui tiga indikator utama. Efektivitas, yaitu seberapa jauh anggaran bisa menggapai tujuan yang telah direncanakan. Efektivitas dilakukan pengukuran berdasarkan pencapaian target kebijakan atau program kerja. Efisiensi, yaitu penggunaan anggaran secara optimal tanpa pemborosan. Efisiensi kinerja anggaran dinilai melalui cara perbandingan realisasi anggaran beserta anggaran yang sudah direncanakan terhadap alokasi yang sudah diberlakukan. Serapan anggaran Belanja, yaitu tingkat penggunaan anggaran berdasarkan rencana belanja yang sudah disusun sebelumnya. Untuk lebih jelas hanya dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

3.1.1 Jenis Data

Studi ini memanfaatkan data berupa angka-angka sebagai bagian dari pendekatan kuantitatif. Data kuantitatif yang diterapkan dalam penelitian ini bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi untuk tahun anggaran 2020-2024 beserta data tambahan yang relevan dengan pokok bahasan penelitian. Data yang dipilih yaitu:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada tahun 2020-2024
- 2) Rencana Kerja dan Anggaran untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
- 3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)
- 4) RPJMD dan Renstra SKPD berfungsi sebagai landasan perencanaan dan implementasi program pembangunan.

3.1.2 Sumber Data

Data yang digunakan diperoleh dari informasi yang didapatkan, dikumpulkan dan tersedia melalui publikasi, serta laporan dari dinas maupun instansi yang terkait, sumber data tersebut meliputi :

- 1) Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi.
- 2) Badan Pengelolaan Keuangan serta Aset Daerah Kota Jambi.
- 3) Literatur-Literatur lainnya Seperti Jurnal-jurnal ekonomi serta buku-buku.

3.2 Metode dan Alat Analisis Data

3.2.1 Metode dan Analisis

Metode yang digunakan pada penelitian ini menerapkan teknik analisis data yakni Rasio Efektifitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja, dan Rasio Efisiensi.

Untuk menjawab tujuan kesatu (1) yakni dengan menganalisis perkembangan realisasi anggaran pendapatan dan belanja SKPD pada BPKAD Kota Jambi berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari total realisasi anggaran pendapatan, total realisasi anggaran belanja, dan persentase pencapaian setiap tahun dari tahun 2020-2024, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Perkembangan Pendapatan} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Tahun Ini} - \text{Realisasi Pendapatan tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Pendapatan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

Tabel 3. 1 Kriteria Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan

Kriteria Perkembangan	Persentase (%)
Sangat Baik	≥ 10
Baik	5-10
Stabil	0-4
Tidak Ada Perkembangan	=0
Kurang Baik	≤ 0

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

$$\text{Target Perkembangan} = \frac{\text{Target Pendapatan Tahun Ini} - \text{Target Pendapatan tahun sebelumnya}}{\text{Target Pendapatan Tahun Sebelumnya}} \times 100\%$$

**Tabel 3. 2 Kriteria Target Perkembangan Realisasi Anggaran
Pendapatan**

Kriteria Perkembangan	Persentase (%)
Sangat Baik	≥ 10
Baik	5-10
Stabil	0-4
Tidak Ada Perkembangan	=0
Kurang Baik	≤ 0

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

$$\text{Perkembangan Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun Ini} - \text{Realisasi belanja tahun sebelumnya}}{\text{Realisasi Belanja Tahun Sebelumnya}} \times 100$$

Tabel 3. 3 Kriteria Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja

Kriteria Perkembangan	Persentase (%)
Sangat Aktif	≥ 10
Aktif	5-10
Stabil	0-4
Tidak Ada Perubahan	=0
Menurun	≤ 0

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

$$Target\ Belanja = \frac{Target\ Belanja\ Tahun\ Ini - Target\ Belanja\ tahun\ sebelumnya}{Target\ Belanja\ Tahun\ Sebelumnya} \times 100\%$$

Tabel 3. 4 Kriteria Target Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja

Kriteria Perkembangan	Persentase (%)
Sangat Aktif	≥ 10
Aktif	5-10
Stabil	0-4
Tidak Ada Perubahan	=0
Menurun	≤ 0

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

Tujuan kedua (2) ialah menganalisis kinerja anggaran yang dilihat dari rasio efektivitas, rasio serapaan anggaran belanja dan rasio efisiensi, anggaran SKPD pada BPKAD Kota Jambi.

a. Anggaran Pendapatan SKPD

Variabel ini diukur dengan tingkat realisasi pendapatan, yaitu seberapa besar pendapatan SKPD yang terealisasi diukur terhadap target yang telah ditetapkan. Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

$$Rasio\ Efektivitas = \frac{Realisasi\ Pendapatan\ SKPD}{Target\ Pendapatan\ SKPD} \times 100\%$$

Tabel 3. 5 Kriteria Tingkat Rasio Efektivitas

Kriteria Efektivitas	Persentase (%)
Sangat efektif	>100
Efektif	90-100
Cukup efektif	80-89
Kurang Efektif	61-79
Tidak Efektif	≤60

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

b. Anggaran Belanja SKPD

Variabel ini dapat diukur dengan persentase serapan anggaran, yang menunjukkan seberapa besar anggaran yang sudah direalisasikan dari total alokasi yang diberikan.

$$\text{Rasio Serapan Anggaran Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja SKPD}}{\text{Target Belanja SKPD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 6 Kriteria Rasio Serapan Anggaran Belanja

Kriteria Anggaran Belanja	Persentase (%)
Sangat Baik	>100
Cukup Baik	90-100
Kurang Baik	76-89
Tidak Baik	≤75

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

c. Anggaran Pembiayaan SKPD

Variabel ini diukur dengan tingkat realisasi belanja dan realisasi pendapatan, yaitu perbandingan antara realisasi belanja SKPD dengan realisasi pendapatan SKPD yang ditetapkan. : (Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, 2024)

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja SKPD}}{\text{Realisasi Pendapatan SKPD}} \times 100\%$$

Tabel 3. 7 Kriteria Tingkat Rasio Efisiensi

Kriteria Efisiensi	Persentase (%)
Tidak Efisien	≥ 100
Kurang Efisien	90 - 100
Cukup efisien	80-89
Efisien	60-79
Sangat Efisien	< 60

Sumber : Hesti Yulia Sabono & Sahusilawane, (2024)

3.3 Operasional Variabel

Berikut ialah definisi operasional variabel pada penelitian ini:

1. **Anggaran Pendapatan SKPD**

Anggaran Pendapatan SKPD adalah jumlah penerimaan yang direncanakan oleh suatu (SKPD) dalam periode anggaran. Pendapatan ini bersumber dari berbagai pos, seperti PAD, dana transfer dari pemerintah pusat serta sumber lainnya. Dalam penelitian ini, anggaran pendapatan diukur berdasarkan target yang telah ditetapkan dan realisasi yang dicapai dalam laporan keuangan SKPD, di sajikan dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

2. **Anggaran Belanja SKPD**

Anggaran Belanja SKPD merupakan alokasi dana yang ditetapkan dalam APBD untuk membiayai program dan aktivitas operasional maupun proyek pembangunan yang dijalankan oleh SKPD. Belanja ini meliputi pengeluaran bagi gaji pegawai, pembelian jasa maupun barang, serta investasi dalam aset tetap bertujuan untuk mendukung penerapan tugas dan fungsi SKPD. Dalam penelitian ini, anggaran belanja diukur berdasarkan jumlah alokasi anggaran, tingkat realisasi, dan efisiensi dalam penggunaannya, disajikan dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

3. **Anggaran Pembiayaan SKPD**

Anggaran Pembiayaan SKPD ialah komponen yang dapat mencerminkan transaksi keuangan yang bersifat pembiayaan, baik yang

berasal dari surplus anggaran tahun sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah, maupun kewajiban pembayaran utang. Pembiayaan ini digunakan untuk menutup defisit atau membiayai pengeluaran yang tidak dapat ditutupi oleh pendapatan murni SKPD. Dalam penelitian ini, anggaran pembiayaan diukur berdasarkan besaran alokasi, realisasi, serta efektivitas penggunaannya dalam mendukung program kerja SKPD, disajikan dalam bentuk satuan rupiah (Rp).

BAB IV

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

4.1 Sejarah Singkat BPKAD Kota Jambi

Kota Jambi adalah salah satu kota yang berada di Pulau Sumatera dan berfungsi sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jambi. Diresmikan pada 28 Mei 1401, wilayah kota ini mencakup area seluas kurang lebih 205,38 km². Kota ini dilintasi oleh Sungai Batanghari, sungai terpanjang di Pulau Sumatera, yang membelah wilayahnya. dan menjadi pusat aktivitas kebudayaan serta perdagangan di bagian timur pulau tersebut. Pada masa dahulu, Jambi dikenal sebagai bagian dari kejayaan kerajaan Melayu yang menjadi pusat aktivitas ekonomi dan hubungan dagang internasional. Seiring perkembangan zaman, Jambi mengalami perubahan menjadi Kota Modern dengan sistem pemerintahan yang semakin tertata. Peran BPKAD sangat penting guna memastikan pembangunan Kota Jambi melalui pengelolaan anggaran yang efektif, transparan.

BPKAD Pembentukan Kota Jambi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14. Sesuai dengan peraturan tersebut, BPKAD berperan sebagai unit pendukung dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, dengan tugas utama membantu Wali Kota Jambi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang tersebut. Lembaga ini dipimpin oleh Kepala Badan, dan berada di bawah tanggung jawab Wali Kota Jambi, melalui Sekretaris Daerah.

4.2 Visi dan Misi

4.2.1 Visi

Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan Barang dan Jasa, yang religus dan Berbudaya.

4.2.2 Misi

Berikut 14 misi pembangunan Kota Jambi yakni:

1. Mengembangkan pembangunan Kota Jambi berlandaskan pada masyarakat yang religius, berpengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya daerah.
2. Mengembangkan kawasan perdagangan barang dan jasa berperan sebagai pusat distribusi antar kabupaten dan provinsi, dengan mengacu pada perencanaan tata kota yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah.
3. Membangun dan meningkatkan infrastruktur transportasi yang berfungsi menghubungkan area permukiman, sarana publik, serta pusat-pusat aktivitas ekonomi.
4. Meningkatkan sistem pendidikan yang fokus pada perluasan akses, peningkatan kualitas, dan relevansi, melalui penguatan sarana dan prasarana, serta pengembangan mutu pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor riil.
5. Membangun sumber daya manusia yang terampil, profesional, dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi serta menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan program dan kegiatan pembangunan daerah, baik sebagai aparatur pelaksana maupun sebagai pelaku pembangunan lainnya.
6. Meningkatkan mutu aparatur pemerintahan yang berfokus pada penegakan hukum dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi, guna menciptakan iklim persaingan yang adil dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pemerintahan, dan politik.
7. Membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, berintegritas, dan dapat dipercaya melalui mekanisme pengawasan serta pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan.
8. Meningkatkan sumber pendanaan pembangunan dengan memaksimalkan potensi pendapatan daerah.
9. Menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang kompetitif, khususnya di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan pemerintahan, dalam menghadapi era otonomi daerah dan globalisasi.

10. Membangun konektivitas antar wilayah melalui kerja sama regional dan internasional yang saling menguntungkan, dengan berlandaskan pada prinsip ekonomi kerakyatan.
11. Mendorong penguatan pelaku Usaha kecil menengah dan koperasi didorong seiring dengan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan sistem ekonomi berbasis kerakyatan yang berorientasi pada keadilan pasar. Sistem ini dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, kompetitif, berwawasan lingkungan, serta berkelanjutan.
12. Mencapai kesejahteraan masyarakat yang tercermin melalui penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas hidup yang layak dan bermartabat, serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, perumahan, layanan kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan lapangan kerja.
13. Penguatan peran dan peningkatan kualitas hidup perempuan, serta pemenuhan kesejahteraan dan perlindungan hak-hak anak.
14. Menjadikan Kota Jambi sebagai kota yang bersih, aman, tertib, dan memiliki nilai estetika, dengan mengedepankan konsep kota hutan tropis yang ramah lingkungan serta mendukung pertumbuhan sosial budaya dan perekonomian masyarakat.

4.3 Kedudukan

BPKAD Kota Jambi merupakan instansi yang menjalankan fungsi pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. Lembaga ini dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Wali Kota Jambi melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi BPKAD mencakup Kepala Badan, Sekretariat, serta sejumlah bidang yang masing-masing dikoordinasikan oleh seorang Kepala Bidang.

4.4 Tugas Pokok dan Fungsi

BPKAD adalah lembaga pengelola keuangan daerah yang berperan dalam memberikan layanan di sektor pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dengan struktur organisasi yang didukung oleh satu Sekretariat dan empat bidang utama. Berikut tugas pokok dan fungsi BPKAD Kota Jambi yaitu:

1. Merancang dan menyusun peraturan serta kebijakan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.
2. Penyusunan panduan dan instruksi teknis dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah.
3. Memberikan dukungan serta melakukan koordinasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.
4. Perumusan panduan, penataan sistem, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
5. Rumusan dan penyusun pendapatan serta koordinasi pendapatan daerah.
6. Melaksanakan evaluasi serta menyusun laporan terhadap program-program di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.
7. Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan kewenangan dan fungsi yang dimiliki.

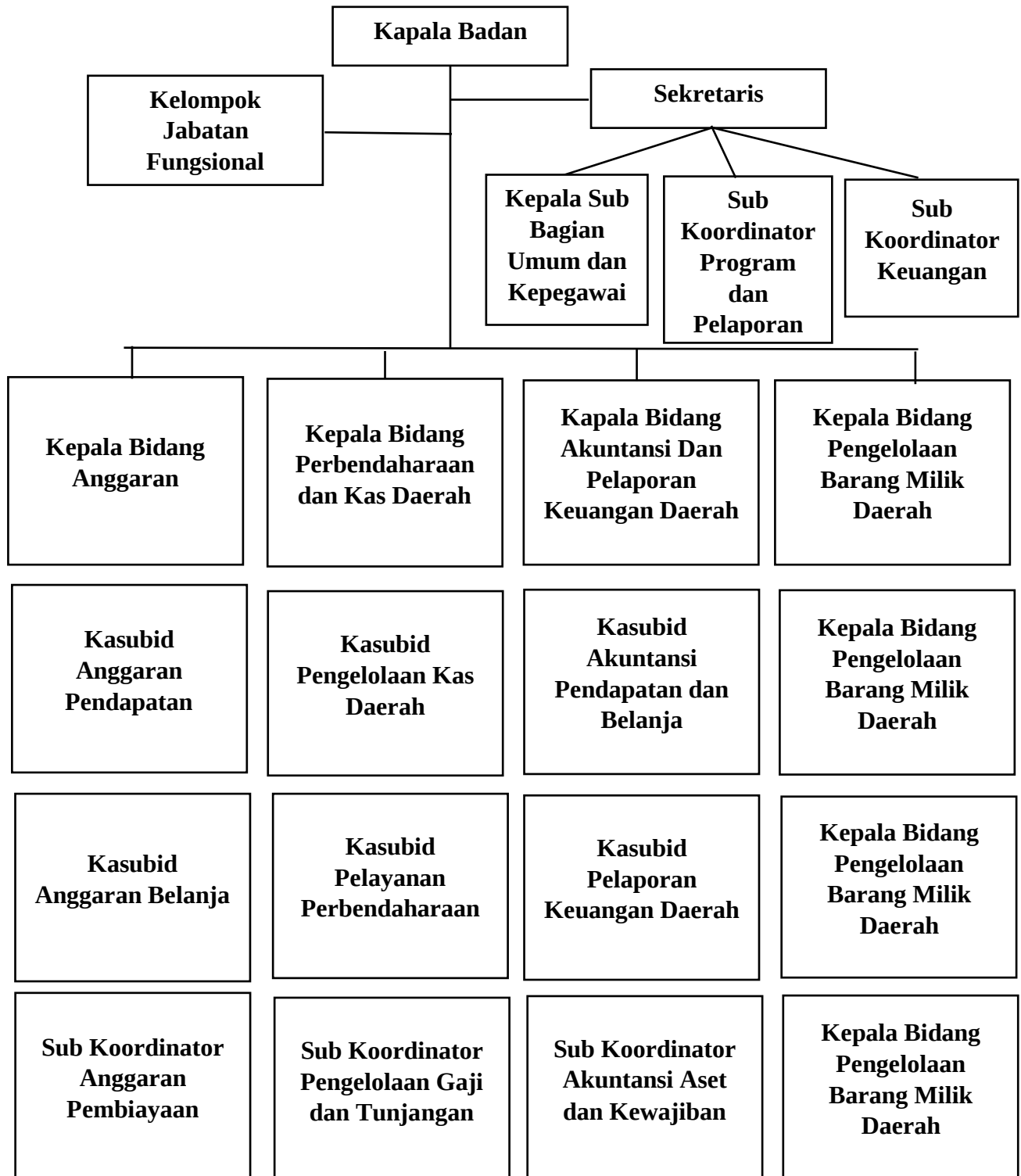
4.5 Struktur Organisasi

Struktur organisasi BPKAD sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali kota Jambi Nomor 44 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri dari
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
3. Bidang Anggaran, terdiri dari

- a. Sub bidang anggaran pendapatan
- b. Sub bidang anggaran belanja
- 4. Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah, terdiri dari
 - a. Sub bidang pengelolaan kas daerah
 - b. Sub bidang pelayanan perbendaharaan
- 5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari
 - a. Sub bidang akuntansi pendapatan dan belanja
 - b. Sub bidang pelaporan keuangan daerah
- 6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari
 - a. Sub bidang penatausahaan barang milik daerah
 - b. Sub bidang pemanfaatan dan pemindah tanganan barang milik daerah
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan layanan fungsional dalam menjalankan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau administrator, sesuai dengan kompetensi keahlian dan keterampilan yang dimiliki.
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Koordinator mencakup berbagai jenis jabatan fungsional yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing, dan pengangkatannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
 - c. Sub koordinator merupakan pejabat fungsional ahli muda yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan dan mengelola kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya pada suatu satuan kerja, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata kerja instansi.

Gambar 2 Struktur Organisasi BPKAD Kota Jambi



4.6 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi unsur signifikan pada pelaksanaan berbagai aktivitas di BPKAD. Jumlah personel yang dimiliki sebanyak 94 orang, mencakup atas pegawai negeri sipil, tenaga kontrak, juga tenaga sukarela. Tenaga sukarela dilibatkan untuk menjalankan tugas-tugas yang tidak dapat ditangani oleh pegawai negeri maupun tenaga kontrak. Adapun data kepegawaian BPKAD disajikan seperti dibawah.

Tabel 4. 1 Komposisi Pegawai BPKAD Kota Jambi Tahun 2025

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH	PENDIDIKAN
1	Eselon II B	1 orang	S1
2	Eselon III A	1 orang	S2
3	Eselon III B	1 orang	S2
4	Eselon III B	3 orang	S1
5	Eselon IV A	3 orang	S2
6	Eselon IV A	5 orang	S1
7	Eselon IV A	1 orang	DIII
8	Jabatan Fungsional Sub Koordinator	1 orang	S2
9	Jabatan Fungsional Sub Koordinator	3 orang	S1
10	Jabatan Fungsional Arsiparis	2 orang	S1
11	Fungsional Umum	1 orang	S2
12	Fungsional Umum	16 orang	S1
13	Fungsional Umum	4 orang	DIII
14	Fungsional Umum	4 orang	SMA
15	TKKP	2 orang	S2
16	TKKP	24 orang	S1
17	TKKP	6 orang	DIII
18	TKKP	16 orang	SMA

4.7 Standar Pelayanan BPKAD Kota Jambi

Dalam rangka melangsungkan tugas maupun fungsi BPKAD Kota Jambi guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya pada sektor pengelolaan keuangan, aset, serta pengembangan dan pengawasan kelembagaan, disajikan uraian mengenai kondisi pelayanan yang telah dilaksanakan oleh instansi tersebut.

1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
2. Layanan dalam penyusunan dan penyesuaian dokumen pelaksanaan anggaran
3. Pelayanan penerbitan SPD
4. Pelayanan verifikasi SPM
5. Pelayanan penerbitan SP2D
6. Layanan pencairan gaji serta penyusunan surat keterangan penghentian pembayaran hak keuangan
7. Fasilitasi pencairan anggaran hibah dan bantuan sosial
8. Pelayanan pengendalian anggaran belanja SKPD
9. Pelayanan rekonsiliasi laporan hasil pengelolaan barang
10. Pelayanan proses persetujuan pinjam pakai, penghapusan barang/aset dan pemusnahan barang milik daerah
11. Fasilitasi peminjaman dokumen legal bernilai, termasuk BPKB dan sertifikat tanah.
12. Pendampingan dalam penyusunan laporan keuangan SKPD
13. Pelayanan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD

4.7.1 Pelayanan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

1. Pelayanan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Dalam rangka melakukan peningkatan kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, butuh dilakukan berbagai langkah agar laporan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan serta dalam pemenuhan ketentuan regulasi perundang-undangan yang ada. Kemudian, untuk mendukung kemudahan pada penyajian data selama

proses audit, diperlukan pendampingan pada penyusunan laporan keuangan, mencakup dengan cara manual ataupun melalui pemanfaatan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

2. Pelayanan Rekonsiliasi Pendapatan dan Belanja SKPD

Dalam rangka meminimalisir kesalahan-kesalahan pencatatan (LRA) untuk mewujudkan laporan keuangan yang bisa menjadi pertanggungjawaban dan terpercaya berdasarkan ketentuan regulasi perundang-undangan, diperlukan proses rekonsiliasi atas pendapatan dan belanja SKPD melalui pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

4.8 Rincian Laporan Realisasi Anggaran SKPD Pada BPKAD Kota Jambi

Berikut tabel realisasi anggaran SKPD pada BPKAD Kota Jambi:

Tabel 4. 2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2020

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	232.060.000.000,00	216.961.981.307	93,49
4	Pendapatan Retribusi Daerah	36.618.000.000,00	40.479.596.103,50	110,55
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	9.602.267.383,48	96,02
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	90.916.193.000,00	88.630.973.240,51	97,49
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	369.594.193.000,00	355.674.818.034,51	96,23
8	Pendapatan Transfer			

9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	62.717.683.000,00	62.351.931.035,00	99,42
11	Dana bagi hasil SDA	24.950.253.000,00	37.368.239.960,00	149,77
12	DAU	690.724.772.000,00	687.484.664.000,00	99,53
13	DAK	254.829.051.182,00	249.254.139.837,00	97,81
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	1.033.221.759.182,00	1.036.458.974.832	100,31
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	37.746.049.000,00	37.746.049.000,00	100,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	37.746.049.000,00	37.746.049.000,00	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	97.614.609.032,00	115.018.774.783,90	117,17
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	101.334.609.032,00	118.738.774.783,90	117,17
23	Total pendapatan transfer	1.172.302.417.214,00	192.943.798.615,90	101,76
24	Lain-lain pendapatan yang sah			

25	Pendapatan hibah	75.761.804.500,00	73.208.658.746,00	96,63
26	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah pendapatan lain-lain yang sah (25 s.d.25	75.761.804.500,00	73.208.658.746,00	96,63
28	Jumlah pendapatan	1.617.658.414.714	1.621.827.275.396,00	100,26
29	Belanja			
30	Belanja Operasional			
31	Belanja Pegawai	680.603.063.244,00	628.395.170.421,00	92,33
32	Belanja Barang dan jasa	597.741.742.413,00	528.395.170.421,00	88,39
33	Bunga	1.000.000.000,00	0,00	0,00
34	Subsidi	0,00	0,00	0,00
35	Hibah	24.181.297.148,00	18.105.901.031,53	74,88
36	Bantuan sosial	7.637.723.000,00	5.671.400.000,00	74,26
37	Jumlah belanja operasional (31s.d 36)	1.311.163.825.805,00	1.180.536.624.523,00	90,04
38	Belanja modal			
39	Belanja tanah	6.880.000.000,00	6.880.000.000,00	100,00
40	Belanja peralatan dan mesin	136.061.777.413,00	130.165.836.495,00	95,67
41	Belanja gedung dan bangunan	123.773.013.303,00	120.545.997.615,00	97,39
42	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	171.445.027.000,00	169.600.168.912,92	98,92
43	Belanja aset tetap	17.081.675.701,00	16.878.760.161,00	98,81
44	Belanja aset lainnya	286.700.000,00	281.115.000,00	98,05
45	Jumlah belanja modal (39s.d.44)	455.528.193.595,00	444.351.878.183,92	97,55
46	Belanja tidak terduga			

47	Belanja tak terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
48	Jumlah belanja tak terduga	60.238.830.381,00	41.044.082.130,00	68,14
	Jumlah Belanja	1.826.930.849.781,00	1.665.932.584.837,45	91,19
49	Transfer			
50	Transfer bantuan keuangan			
51	Bantuan keuangan lain	1.904.484.344,00	1.782.885.636,00	93,62
52	Jumlah transfer/bantuan keuangan	1.904.484.344,00	1.782.885.636,00	93,62
53	Jumlah transfer	1.904.484.334,00	1.782.885.636,00	93,62
54	Jumlah belanja dan transfer	1.828.835.334.125,00	1.667.715.470.473,45	91,19
55	Surplus/(defisit	211.176.919.411,00	45.888.195.077,06	21,73
56	Pembiayaan			
57	Penerimaan daerah			
58	Penggunaan silpa	211.176.919.411,00	211.176.919.411,12	100,00
59	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	0,00	266.690,00	0,00
60	Jumlah penerimaan	211.176.919.411,00	211.176.919.411,12	100,00
61	Pengeluaran pembiayaan			
62	Pernyataan modal pemda	0,00	0,00	0,00
63	Pembayaran hutang pada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
64	Jumlah pengeluaran	0,00	0,00	0,00
65	Pembiayaan netto	211.176.919.411,00	211.176.919.411,12	100,00
66	Sisa lebih pembiayaan anggaran		165.288.991.024,00	

Tabel 4. 3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	297.860.000.000,00	244.726.978.039,00	82,16
4	Pendapatan Retribusi Daerah	55.312.900.000,00	51.844.265.427,60	93,73
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383,00	9.638.772.829,50	100,38
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	91.226.666.850,00	78.520.627.495,36	86,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	454.001.834.233,00	384.730.643.791,46	84,74
8	Pendapatan Transfer			
9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	62.554.888.000,00	100.837.130.545,00	161,20
11	Dana bagi hasil SDA	23.915.211.465,00	41.669.613.112,00	174,24
12	DAU	675.288.713.000,00	675.239.528.807,00	99,99
13	DAK	225.964.623.643,00	212.155.615.327,00	93,89
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	987.723.436.108,00	1.029.901.887.791,00	104,27
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	40.519.528.000,00	40.519.528.000,00	100,00

17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	40.519.528.000,00	40.519.528.000,00	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.216.579.693,00	131.885.386.955,00	118,58
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	114.936.579.693,00	135.605.386.955,00	117,98
23	Total pendapatan transfer	1.143.179.543.801,00	1.206.026.802.754,68	99,67
24	Lain-lain pendapatan yang sah			
25	Pendapatan hibah	1.000.000.000,00	702.908.280,22	70,29
26	Pendapatan lainnya	60.224.550.000,00	61.488.094.937,00	102,10
27	Jumlah pendapatan lain” yang sah (25 s.d 26)	61.224.550.000,00	62.191.003.217,22	101,58
28	Jumlah pendapatan	1.658.405.928.034,00	1.652.948.449.754,68	99,67
29	Belanja			
30	Belanja Operasional			
31	Belanja pegawai	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
32	Belanja barang dan jasa	570.570.340.308,00	503.686.765.887,85	88,28
33	Belanja bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
34	Belanja subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
35	Belanja hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46

36	Belanja bantuan sosial	7.287.353.850,00	6.640.634.682,00	91,13
37	Jumlah belanja operasional (31 s.d 36)	1.386.617.509.691,00	1.238.942.121.720,85	89,35
38	Belanja modal			
39	Belanja tanah	9.485.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
40	Belanja peralatan dan mesin	94.221.528.031,00	87.421.234.280,00	92,78
41	Belanja gedung dan bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
42	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
43	Belanja aset tetap	12.888.714.973,00	12.838.061.250,00	99,61
44	Belanja aset	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah belanja modal (39 s.d.44)	564.662.175.542,00	495.805.792.008,94	87,81
46	Belanja tak terduga			
47	Belanja tak terduga	10.415.233.825,00	5.609.964.289,99	53,86
48	Jumlah belanja tak terduga	10.415.233.825,00	5.609.964.289,99	53,86
	Jumlah belanja	1.961.694.919.058	1.740.357.878.019,78	88,72
49	Transfer			
50	Transfer bantuan keuangan			
51	Bantuan keuangan lain	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah transfer/bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah transfer	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah belanja dan transfer	1.961.694.919.058,00	1.740.357.878.019,78	88,72
55	Surplus/defisit	303.288.991.024,00	87.409.428.265,10	28,82
56	Pembiayaan			
57	Penerimaan daerah			

58	Penggunaan silpa	165.288.991.024,00	165.288.991.024,06	100,00
59	Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00
60	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	140.000.000.000,00	83.113.644.000,00	59,37
61	Jumlah penerimaan	305.288.991.024,00	249.088.085.423,59	81,59
62	Pengeluaran pembiayaan			
63	Penyertaan modal pemerintah daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
64	Pembayaran utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah pengeluaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
66	Pembiayaan Netto	303.288.991.024,00	247.088.085.423,59	81,47
67	Sisa lebih pembiayaan anggaran		159.678.657.158,49	-

Tabel 4. 4 Laporan Realisasi Anggaran 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	297.860.000.000,00	244.726.978.039,00	82,16
4	Pendapatan Retribusi Daerah	55.312.900.000,00	51.844.265.427,60	93,73
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383,00	9.638.772.829,50	100,38
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	91.226.666.850,00	78.520.627.495,36	86,07
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	454.001.834.233,00	384.730.643.791,46	84,74
8	Pendapatan Transfer			
9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	62.554.888.000,00	100.837.130.545,00	161,20
11	Dana bagi hasil SDA	23.915.211.465,00	41.669.613.112,00	174,24
12	DAU	675.288.713.000,00	675.239.528.807,00	99,99
13	DAK	225.964.623.643,00	212.155.615.327,00	93,89
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	987.723.436.108,00	1.029.901.887.791,00	104,27
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	40.519.528.000,00	40.519.528.000,00	100,00

17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	40.519.528.000,00	40.519.528.000,00	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	111.216.579.693,00	131.885.386.955,00	118,58
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	3.720.000.000,00	3.720.000.000,00	100,00
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	114.936.579.693,00	135.605.386.955,00	117,98
23	Total pendapatan transfer	1.143.179.543.801,00	1.206.026.802.754,68	99,67
24	Lain-lain pendapatan yang sah			
25	Pendapatan hibah	1.000.000.000,00	702.908.280,22	70,29
26	Pendapatan lainnya	60.224.550.000,00	61.488.094.937,00	102,10
27	Jumlah pendapatan lain” yang sah (25 s.d 26)	61.224.550.000,00	62.191.003.217,22	101,58
28	Jumlah pendapatan	1.658.405.928.034,00	1.652.948.449.754,68	99,67
29	Belanja			
30	Belanja Operasional			
31	Belanja pegawai	745.627.187.957,00	682.947.098.349,00	91,59
32	Belanja barang dan jasa	570.570.340.308,00	503.686.765.887,85	88,28
33	Belanja bunga	15.000.000.000,00	1.626.646.569,00	10,84
34	Belanja subsidi	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00
35	Belanja hibah	47.934.807.576,00	43.843.156.233,00	91,46

36	Belanja bantuan sosial	7.287.353.850,00	6.640.634.682,00	91,13
37	Jumlah belanja operasional (31 s.d 36)	1.386.617.509.691,00	1.238.942.121.720,85	89,35
38	Belanja modal			
39	Belanja tanah	9.485.000.000,00	9.426.780.000,00	99,39
40	Belanja peralatan dan mesin	94.221.528.031,00	87.421.234.280,00	92,78
41	Belanja gedung dan bangunan	184.496.593.464,00	159.133.484.114,94	86,25
42	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	263.570.339.074,00	226.986.232.364,00	86,12
43	Belanja aset tetap	12.888.714.973,00	12.838.061.250,00	99,61
44	Belanja aset	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah belanja modal (39 s.d.44)	564.662.175.542,00	495.805.792.008,94	87,81
46	Belanja tak terduga			
47	Belanja tak terduga	10.415.233.825,00	5.609.964.289,99	53,86
48	Jumlah belanja tak terduga	10.415.233.825,00	5.609.964.289,99	53,86
	Jumlah belanja	1.961.694.919.058	1.740.357.878.019,78	88,72
49	Transfer			
50	Transfer bantuan keuangan			
51	Bantuan keuangan lain	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah transfer/bantuan keuangan	0,00	0,00	0,00
53	Jumlah transfer	0,00	0,00	0,00
54	Jumlah belanja dan transfer	1.961.694.919.058,00	1.740.357.878.019,78	88,72
55	Surplus/defisit	303.288.991.024,00	87.409.428.265,10	28,82
56	Pembiayaan			
57	Penerimaan daerah			

58	Penggunaan silpa	165.288.991.024,00	165.288.991.024,06	100,00
59	Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00
60	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	140.000.000.000,00	83.113.644.000,00	59,37
61	Jumlah penerimaan	305.288.991.024,00	249.088.085.423,59	81,59
62	Pengeluaran pembiayaan			
63	Penyertaan modal pemerintah daerah	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
64	Pembayaran utang kepada pihak ketiga	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah pengeluaran	2.000.000.000	2.000.000.000	100,00
66	Pembiayaan Netto	303.288.991.024,00	247.088.085.423,59	81,47
67	Sisa lebih pembiayaan anggaran		159.678.657.158,49	-

Tabel 4. 5 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	320.380.000.000,00	301796.809.124,00	94,20
4	Pendapatan Retribusi Daerah	50.544.550.000,00	40.216.623.270,14	79,65
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.602.267.383,00	10.528.936.340,30	109,65
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	98.643.995.455,00	84.483.587.653,56	85,64
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	479.170.812.838,00	437.025.956.388,00	91,20
8	Pendapatan Transfer			
9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	69.627.996.000,00	77.079.036.732,00	110,70
11	Dana bagi hasil SDA	48.305.754.000,00	85.400.197.236,00	176,79
12	DAU	670.654.802.680,00	670.654.802.680,00	100,00
13	DAK	244.728.107.051,00	228.569.943.396,00	93,40
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	1.033.316.659.731,00	1.061.703.980.044,00	102,75
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	22.192.745.000,00	22.192.745.000,00	100,00

17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	22.192.745.000,00	22.192.745.000,00	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	129.964.687.902,00	140.777.167.144,00	108,32
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	100,00
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	136.164.687.902,00	146.977.167.144,00	107,94
23	Total pendapatan transfer	1.191.674.092.633,00	1.230.873.892.188,00	103,29
24	Lain-lain pendapatan yang sah			
25	Pendapatan hibah	0,00	897.906.542,80	0,00
26	Pendapatan lainnya	0,00	0,00	0,00
27	Jumlah pendapatan lain” yang sah (25 s.d 26)	0,00	897.906.542,80	0,00
28	Jumlah pendapatan	1.670.844.905.471,00	1.668.797.755.118,80	99,88
29	Belanja			
30	Belanja Operasional			
31	Belanja pegawai	736.429.689.205,00	657.648.319.579,50	89,30
32	Belanja barang dan jasa	593.746.544.387,00	535.487.916.812,58	90,19
33	Belanja bunga	6.901.104.160,00	5.866.774.340,00	85,01
34	Belanja subsidi	2.100.000.000,00	614.964.000,00	29,28
35	Belanja hibah	52.968.676.490,00	47.357.346.311,00	89,41

36	Belanja bantuan sosial	14.440.317.100,00	3.934.494.800,00	27,25
37	Jumlah belanja operasional (31 s.d 36)	1.406.586.331.342,00	1.250.909.815.843,00	88,93
38	Belanja modal			
39	Belanja tanah	7.600.000.000,00	7.565.000.000,00	99,54
40	Belanja peralatan dan mesin	70.009.502.815,00	64.474.137.348,49	92,09
41	Belanja gedung dan bangunan	169.850.261.130,00	143.907.007.228,00	84,73
42	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	142.063.825.839,00	140.522.841.590,00	98,92
43	Belanja aset tetap	12.306.092.487,00	12.160.097.082,00	99,81
44	Belanja aset	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah belanja modal (39 s.d.44)	401.829.682.271,00	368.629.083.248,49	91,74
46	Belanja tak terduga			
47	Belanja tak terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
48	Jumlah belanja tak terduga	4.416.645.016,00	3.208.533.087,00	72,65
	Jumlah belanja	1.812.832.658.629,00	1.622.747.432.178,57	89,51
49	Transfer			
50	Transfer bantuan keuangan			
51	Bantuan keuangan lain	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
52	Jumlah transfer/bantuan keuangan	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
53	Jumlah transfer	100.000.000,00	100.000.000,00	100,00
54	Jumlah belanja dan transfer	1.812.932.658.629,00	1.622.847.432.178,57	89,52
55	Surplus/defisit	142.087.753.158,00	45.950.322.940,23	32,34
56	Pembiayaan			
57	Penerimaan daerah			

58	Penggunaan silpa	159.678.657.158,00	159.678.657.158,49	100,00
59	Koreksi pembukuan tahun sebelumnya	0,00	4.666.469,00	0,00
60	Pinjaman dalam negeri-lembaga keuangan bukan bank	55.409.096.000,00	55.409.096.000,00	100,00
61	Jumlah penerimaan	215.087.753.158,00	215.092.419.627,49	100,00
62	Pengeluaran pembiayaan			
63	Penyertaan modal pemerintah daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	100,00
64	Pembayaran utang kepada pihak ketiga	70.000.000.000,00	70.000.000.000,00	100,00
65	Jumlah pengeluaran	73.000.000.000,00	73.000.000.000,00	100,00
66	Pembiayaan Netto	142.087.753.158,00	142.087.753.158,00	100,00
67	Sisa lebih pembiayaan anggaran		188.042.742.567,49	-

Tabel 4. 6 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	370.000.000.000,00	325.296.715.240,00	87,92
4	Pendapatan Retribusi Daerah	56.976.320.000,00	39.366.332.496,91	69,09
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	10.637.060.712,59	106,37
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	104.111.650.969,00	73.160.532.340,44	70,27
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	541.087.970.969,00	448.460.640.789,94	82,88
8	Pendapatan Transfer			
9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	75.661.038.428,00	75.598.199.428,00	99,92
11	Dana bagi hasil SDA	36.352.920.895,00	36.352.920.895,00	100,00
12	DAU	704.899.045.000,00	710.687.966.817,00	100,82
13	DAK	227.916.574.547,00	221.537.546.491,00	97,20
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	1.044.829.578.870,00	1.044.176.633.631,00	99,94
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	5.918.541.000,00	5.918.541.000,00	100,00

17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	5.918.541.000,00	5.918.541.000,00	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156.810.634.510,00	156.810.634.510,00	100,00
20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	7.105.180.940,00	7.350.000.000,00	103,45
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	163.915.815.450,00	164.160.634.510,00	100,15
23	Total pendapatan transfer	1.214.663.935.320,00	1.214.255.805.141,00	99,97
24	Lain-lain pendapatan yang sah			
25	Pendapatan hibah	0,00	27.133.755,30	0,00
26	Pendapatan lainnya	0,00	27.133.755,30	0,00
27	Jumlah pendapatan lain” yang sah (25 s.d 26)	0,00	27.133.755,30	0,00
28	Jumlah pendapatan	1.755.751.906.289,00	1.662.743.583.686,24	94,70
29	Belanja			
30	Belanja Operasional			
31	Belanja pegawai	706.630.168.630,00	633.646.621.081,25	89,88
32	Belanja barang dan jasa	596.231.724.151,00	542.691.984.444,05	91,02
33	Belanja bunga	1.000.000.000,00	962.846.340,00	96,28
34	Belanja subsidi	1,642.200.000,00	1.113.369.872,00	67,80
35	Belanja hibah	69.219.581.328,00	66.177.659.650,00	95,61

36	Belanja bantuan sosial	6.158.008.000,00	5.662.232.790,00	91,95
37	Jumlah belanja operasional (31 s.d 36)	1.380.881.682.109,00	1.250.254.714.177,30	90,54
38	Belanja modal			
39	Belanja tanah	6.327.611.643,00	6.320.000.000,00	99,88
40	Belanja peralatan dan mesin	116.026.839.113,00	110.429.401.429,00	95,18
41	Belanja gedung dan bangunan	187.436.741.564,00	184.015.001.376,00	98,17
42	Belanja jalan, irigasi dan jaringan	153.169.601.770,00	151.582.027.590,00	98,96
43	Belanja aset tetap	13.068.058.102,00	13.049.752.793,00	99,86
44	Belanja aset	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah belanja modal (39 s.d.44)	476.028.852.192,00	465.396.183.188,00	97,77
46	Belanja tak terduga			
47	Belanja tak terduga	6.884.114.555,00	4.604.559.306,00	66,89
48	Jumlah belanja tak terduga	6.884.114.555,00	4.604.559.306,00	66,89
	Jumlah belanja	1.863.794.648.856,00	1.720.255.456.671,30	92,30
49	Surplus/Defisit	108.042.742.567,00	57.511.872.985,00	53,23
50	Pembiayaan			
51	Penerimaan Daerah			
52	Penggunaann SILPA	188.042.742.567,00	188.042.742.567,72	100,00
53	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00
54	Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga	0,00	0,00	0,00

	Keuangan Bukan Bank			
55	Jumlah Penerimaan	188.042.742.567,0 0	188.086.807.973,7 2	100,02
56	Pengeluaran Pembiayaan			
57	Pernyataan Modal Pemerintah Daerah	10.000.000.000.00	10.000.000.000.00	100,00
58	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri- lembaga keuangan bukan bank	70.000.000.000.00	68.522.740.000.00	97,89
59	Jumlah pengeluaran	80.000.000.000.00	78.522.740.000.00	98,15
60	Pembiayaan Netto	108.042.742.567.0 0	109.564.067.973.7 2	101,41
61	Sisa lebih pembiayaan anggaran	-	52.052.194.988.66	-

Tabel 4. 7 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024

No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
2	Pendapatan Asli Daerah			
3	Pendapatan Pajak Daerah	345.000.000.000	330.056.169.249	95,67
4	Pendapatan Retribusi Daerah	60.192.320.000	32.371.125.336	53,78
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.169.808.938	18.905.457.211	104,05
6	Lain lain Pendapatan Asli yang Sah	84.817.746.000	73.922.699.814	87,15
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d 6)	508.179.874.938	455.255.451.610	89,59
8	Pendapatan Transfer			
9	Transfer Pemerintah Pusat – dana Perimbangan			
10	Dana bagi hasil pajak	81.720.441.000	81.724 986.000	100,01
11	Dana bagi hasil SDA	56.886.371.000	56.886.371.000	100,00
12	DAU	823.711.077.000	813.729.510.984	98,79
13	DAK	238.591.823.000	232.030.051.346	98,79
14	Jumlah pendapatan transfer dana perimbangan	1.200.909.721.000	1.184.370.919.330	98,62
15	Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya			
16	Dana Penyesuaian	11.796.475.000	11.796.475.000	100,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer lain	11.796.475.000	11.796.475.000	100,00
18	Transfer Pemerintah Provinsi			
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	156.810.634.000	109.711.001.588	69,96

20	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0,00
21	Pendapaatan Transfer Bantuan Keuangan dari provinsi	7.350.000.000	2.590.000.000	35,24
22	Jumlah transfer provinsi (19s.d 21)	164.160.634.000	112.301.001.588	35,24
23	Total pendapatan transfer	1.376.866.830	1.308.468.395.918	95,83
24	Lain-lain pendapatan yang sah			
25	Pendapatan hibah	1.488.000.000	1.458.506.393	98,02
26	Jumlah lain-lain pendapatan yang sah (25 sd 26)	1.488.000.000	1.458.506.393	93,02
27	Jumlah Pendapatan	1.886.534.704.938	1.765.182.353.921	93,57
28	Belaja			
29	Belanja operasi			
30	Belanja pegawai	803.726.428.338	756.006.034.053	94,06
31	Belanja barang dan jasa	600.993.424.389	538.553.000,219	89,61
32	Bunga			
33	Subsidi			
34	Hibah	92.529.313.529	91.245.284.226	98,61
35	Bantuan sosial	7.179.623.000	6.831.086.000	95,15
36	Jumlah belanja operasi (31 sd 36)	1.504.428.798.256	1.392.635.404.500	92,57
37	Belanja modal			
38	Belanja tanah	3.212.856.818	1.790.275.000	55,72
39	Belanja peralatan dan mesin	115.747.578.416	110.768.234.004	95,70
40	Belanja gedung dan bangunan	147.122.576.033	143.608.534.591	97,61
41	Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan	137.877.857.352	135.889.410.117	98,56
42	Belanja aset tetap lainnya	14.865.092.500	14.865.552.390	100,00
43	Belanja aset lainnya	109.950.000	104.800.000	95,32
44	Jumlah belanja modal	418.935.911.164	407.026.806.103	97,16
45	Belanja tak terduga	5.222.190.507	590.157.659	11,30

46	Jumlah belanja tak terduga	5.222.190.507	590.157.659	11,30
47	Jumlah belanja	1.928.566.899.927	1.800.252.2368.262	93,35
48	Transfer			
49	Transfer bantuan keuangan			
50	Bantuan keuangan lainnya			
51	Jumlah transfer atau bantuan keuangan			
52	Jumlah transfer			
53	Jumlah belanja dan transfer	1.928.586.899.927	1.800.252.368.262	93, 35
54	Surplus/defisit	42.052.194.989	35.070.00014.340	83,40
55	Pembiayaan			
56	Penerimaan daerah			
57	Penggunaan SILPA	52.052.194.989	52.052.194.988	100,00
58	Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya		472.865.150	
59	Pinjaman dalam negeri- Lembaga keuangan bukan bank			
60	Jumlah penerimaan (58 sd 60)	52.052.194.989	52.525.060.138	100,91
61	Pengeluaran pembiayaan			
62	Penyertaan modal pemerintah daerah	10.000.000.000	5.000.000.000	50,00
63	Pembayaran pokok pinjaman dalam negeri- Lembaga keuangan bukan			
64	Jumlah pengeluaran	10.000.000.000	5.000.000.000	50,00
65	Pembiayaan Netto	42.052.194.989	47.525.060.138	113.01
66	Sisa lebih pembayaran anggaran		12.45.045.797	

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

5.1 Analisis Data

5.1.1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan Pada BPKAD Tahun 2020-2024

Pada setiap organisasi pemerintah daerah, termasuk BPKAD, realisasi anggaran pendapatan memiliki peranan penting dalam mencerminkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Realisasi pendapatan yang optimal menunjukkan bahwa instansi mampu menghimpun sumber-sumber pendapatan sesuai dengan target yang sudah direncanakan dalam APBD. Dengan demikian, penting guna mengamati perkembangan realisasi anggaran pendapatan dari tahun ke tahun sebagai dasar dalam menilai kinerja keuangan serta sebagai bahan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih, Bagian ini menguraikan tentang dinamika perkembangan realisasi anggaran pendapatan BPKAD Kota Jambi selama lima tahun belakangan, melalui tahun 2020 hingga 2024, yang ditampilkan pada Tabel 5.1 dibawah:

**Tabel 5. 1 Perkembangan Realisasi Anggaran Pendapatan BPKAD
Tahun 2021-2024**

Tahun	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Realisasi Tahun ini (Rp)	Perkembangan	Kriteria
2021	1.621.827.275.396	1.652.948.449.754	1,6	S
2022	1.652.948.449.754	1.688.797.755.118	1,7	S
2023	1.688.797.755.118	1.662.743.583.686	1,7	S
2024	1.662.743.583.686	1.765.182.353.921	1,8	S

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

S = Stabil

Sesuai dengan Tabel 5.1, peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan realisasi anggaran pendapatan dari tahun 2021 hingga 2024, diketahui bahwa persentase perbandingan antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan secara bertahap, meskipun berada pada kategori stabil. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan

sebesar 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini didorong oleh mulai pulihnya aktivitas ekonomi pasca pandemi COVID-19 serta meningkatnya efisiensi dalam pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selanjutnya, pada tahun 2022, persentase pertumbuhan meningkat menjadi 1,7%. Hal ini disebabkan oleh optimalisasi pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang mendukung pelaporan dan pelacakan pendapatan secara real-time.

Namun, pada tahun 2023, meskipun persentasenya tetap di angka 1,7%, secara nominal terjadi penurunan pendapatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain fluktuasi ekonomi makro, penurunan daya beli masyarakat, serta belum optimalnya realisasi dana transfer dari pusat. Meski demikian, pada tahun 2024, realisasi pendapatan mengalami peningkatan kembali, mencapai 1,8%, yang masih tergolong stabil. Peningkatan ini disebabkan oleh strategi intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD, serta meningkatnya kesadaran wajib pajak dalam melakukan pembayaran tepat waktu, didukung oleh digitalisasi sistem pelayanan pajak daerah.

Tabel 5. 2 Perkembangan Target Pendapatan BPKAD Tahun 2021-2024

Tahun	Target Tahun Sebelumnya (Rp)	Target Tahun ini (Rp)	Perkembangan	Kriteria
2021	1.617.658.414.714	1.658.405.928.034	1,6	S
2022	1.658.405.928.034	1.670.844.905.471	1,7	S
2023	1.670.844.905.471	1.755.751.906.289	1,7	S
2024	1.755.751.906.289	1.886.534.704.938	1,9	S

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Sesuai pada tabel 5.2 peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan target pendapatan BPKAD Kota Jambi dari tahun 2021 hingga 2024, terlihat bahwa persentase peningkatan target berada pada kisaran 1,6% hingga 1,9% dan dikategorikan stabil setiap tahunnya. Pada tahun 2021, target pendapatan meningkat sebesar 1,6% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini mencerminkan optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi serta upaya mengembalikan kapasitas fiskal melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022,

target kembali dinaikkan sebesar 1,7%, sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi peningkatan penerimaan dari sektor pajak dan retribusi yang mulai mengalami perbaikan seiring meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, pada tahun 2023, target kembali naik sebesar 1,7%, yang didasari oleh rencana pemerintah untuk memperluas cakupan pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan dari sumber-sumber lain seperti dana transfer dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Di tahun 2024, target pendapatan mengalami kenaikan tertinggi selama periode tersebut, yakni sebesar 1,9%. Hal ini disebabkan oleh strategi peningkatan intensitas penggalan PAD melalui digitalisasi sistem pemungutan dan perluasan basis pajak daerah, serta adanya proyeksi pertumbuhan ekonomi lokal yang lebih positif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, kenaikan target yang konsisten menunjukkan kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyusun target pendapatan yang realistis, sambil tetap memperhatikan potensi penerimaan dan kondisi ekonomi aktual.

5.1.2 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja Pada BPKAD Tahun 2020-2024

Belanja daerah menjadi satu diantara unsur utama pada APBD yang mencerminkan Tingkat kemampuan pemerintah daerah ketika mengimplementasikan program juga kegiatan yang sudah disusun. Kinerja realisasi belanja sangat penting untuk dianalisis karena menunjukkan efektivitas pelaksanaan anggaran oleh perangkat daerah, termasuk BPKAD. Melalui analisis realisasi anggaran belanja, dapat diketahui tingkat efisiensi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik. Dengan demikian, dalam bagian ini ditampilkan data terkait perkembangan realisasi anggaran belanja

BPKAD Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 5.2 dibawah:

Tabel 5. 3 Perkembangan Realisasi Anggaran Belanja BPKAD Tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Tahun Sebelumnya (Rp)	Realisasi Tahun ini (Rp)	Perkembangan	Kriteria
2021	1.665.932.584.837	1.740.357.878.019	1,7	S
2022	1.740.357.878.019	1.622.747.432.178	1,6	S
2023	1.622.747.432.178	1.720.255.456.671	1,7	S
2024	1.720.255.456.671	1.800.252.368.262	1,8	S

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

S = Stabil

Sesuai dengan Tabel 5.3, peneliti menyimpulkan bahwa perkembangan realisasi anggaran belanja BPKAD dari tahun 2021 hingga 2024 dikategorikan stabil. Tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 1,7% yang juga dikategorikan stabil, seiring dengan meningkatnya belanja untuk pemulihan ekonomi dan penguatan infrastruktur pelayanan publik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan kembali ke angka 1,6% yang masih tergolong stabil, disebabkan oleh pengendalian anggaran dan pergeseran prioritas belanja ke sektor yang lebih mendesak. Tahun 2023 mencatatkan peningkatan menjadi 1,7% akibat percepatan realisasi program strategis serta pembiayaan kegiatan akhir tahun anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2024, realisasi belanja meningkat menjadi 1,8% yang tetap dikategorikan stabil.

Tabel 5. 4 Target Perkembangan Belanja BPKAD Tahun 2021-2024

Tahun	Target Tahun Sebelumnya (Rp)	Target Tahun ini (Rp)	Perkembangan	Kriteria
2021	1.826.930.849.781	1.961.694.919.058	2,0	S
2022	1.961.694.919.058	1.812.832.658.629	1,8	S
2023	1.812.832.658.629	1.863.794.648.856	1,9	S
2024	1.863.794.648.856	1.928.586.899.927	1,9	S

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Sesuai dengan Tabel 5.3, peneliti menyimpulkan bahwa Berdasarkan data perkembangan target pendapatan BPKAD Kota Jambi dari tahun 2021 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kenaikan target dari tahun ke tahun berada dalam kategori stabil, dengan persentase perbandingan berkisar antara 1,8% hingga 2,0%. Pada tahun 2021, target pendapatan meningkat sebesar 2,0% dibanding tahun sebelumnya. Kenaikan ini merupakan respon dari optimisme pemerintah daerah terhadap pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, yang disertai dengan meningkatnya proyeksi penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat.

Namun, pada tahun 2022, target pendapatan mengalami penurunan menjadi 1,8%. Penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian terhadap kondisi fiskal yang lebih konservatif, di mana pemerintah memperkirakan potensi pendapatan mengalami perlambatan karena belum sepenuhnya pulihnya sektor-sektor ekonomi unggulan daerah, serta kebijakan pengendalian belanja secara nasional. Pada tahun 2023, target kembali dinaikkan menjadi 1,9%, seiring dengan perbaikan indikator ekonomi daerah, serta kebijakan daerah yang mendorong digitalisasi layanan perpajakan daerah dan intensifikasi pendapatan dari sektor retribusi.

Selanjutnya, pada tahun 2024, target pendapatan ditingkatkan lagi sebesar 1,9%, tetap dalam kategori stabil. Kenaikan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah terus berupaya menjaga pertumbuhan fiskal yang berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan kapasitas ekonomi riil masyarakat dan kemampuan pemungutan pendapatan daerah secara optimal. Secara keseluruhan, fluktuasi dalam tingkat kenaikan target pendapatan ini

mencerminkan penyesuaian antara ekspektasi fiskal dan kondisi ekonomi aktual yang dinamis.

5.2 Analisis Kinerja Anggaran Pada BPKAD Kota Jambi Dilihat Dari Rasio Efektivitas, Rasio Serapan Anggaran Belanja dan Rasio Efisiensi

5.2.1 Analisis Rasio Efektivitas BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Salah satu tolok ukur yang dipakai untuk mengevaluasi kinerja tersebut adalah rasio efektivitas, yang mengukur tingkat keberhasilan BPKAD untuk memenuhi pencapaian pendapatan daerah berdasarkan target yang dibuat. Rasio tersebut memberikan gambaran mengenai sejauh mana pemerintah daerah memiliki kompetensi, khususnya BPKAD, dalam mengelola berbagai jenis pemasukan secara efisien tepat sasaran. Berikut pada tabel 5.2.1, hasil analisis rasio efektivitas BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024 yaitu:

Tabel 5. 5 Analisis Rasio Efektivitas BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2020	1.617.658.414.714	1.621.827.275.396	100,26	SE
2021	1.658.405.928.034	1.652.948.449.754	99,67	E
2022	1.670.844.905.471	1.668.797.755.118	99,88	E
2023	1.755.751.906.289	1.662.743.583.686	94,70	E
2024	1.886.534.704.938	1.765.182.353.921	93,55	E

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

SE = Sangat Efektif

E = Efektif

Berdasarkan tabel 5.3 peneliti menyimpulkan kinerja anggaran BPKAD Kota Jambi dalam hal efektivitas realisasi pendapatan selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil, meskipun terdapat sedikit penurunan melalui tahun ke tahun. Saat tahun 2020 rasio efektivitas mencapai 100,26%, yang menunjukkan kinerja sangat efektif. Perihal tersebut mempunyai arti realisasi pendapatan melebihi target yang telah ditetapkan, mencerminkan pengelolaan pendapatan yang sangat baik juga perencanaan anggaran secara realistis. Pada tahun 2021 rasio efektivitas sebesar 99,67%,

masih dalam kategori sangat efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa BPKAD tetap mampu merealisasikan pendapatan hampir sepenuhnya sesuai target, meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 efektivitas berada pada 99,88%, yang juga termasuk sangat efektif. Kinerja tahun ini sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021, menandakan adanya perbaikan dalam upaya pengumpulan pendapatan daerah. Pada tahun 2023 Rasio efektivitas menurun menjadi 94,70%, masuk kategori cukup efektif. Penurunan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara target dan realisasi pendapatan, yang kemungkinan disebabkan oleh peningkatan target yang tidak sebanding dengan kemampuan realisasi. Pada tahun 2024 tingkat efektivitas kembali mengalami penurunan menjadi 93,55%, juga masih berada pada kategori cukup efektif. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya meskipun pendapatan tetap direalisasikan dalam jumlah besar, terdapat tantangan dalam mencapai target yang lebih tinggi.

Penurunan efektivitas realisasi anggaran pendapatan BPKAD Kota Jambi melalui tahun ke tahun dikarenakan atas sejumlah faktor. Saat tahun 2020 realisasi pendapatan sangat tinggi disebabkan oleh adanya pelampauan target atau perencanaan yang sangat hati-hati akibat ketidakpastian di awal pandemi COVID-19, pemerintah daerah cenderung menetapkan target yang realistis bahkan rendah, sehingga realisasi bisa melampaui target. Pada tahun 2021 terjadi penurunan kecil dibandingkan 2020, hal ini di pacu oleh dampak lanjutan pandemi, yang dimulai berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi masyarakat dan pendapatan daerah, terutama dari pajak retribusi. Meskipun tetap tinggi, tekanan ekonomi menyebabkan sedikit penurunan capaian. Pada tahun 2022 mengalami peningkatan sedikit melalui tahun sebelumnya. Perihal tersebut menunjukkan adanya pemulihan ekonomi pasca-pandemi, di mana aktivitas masyarakat mulai normal, dan pendapatan daerah kembali meningkat. Pada tahun 2023 penurunan signifikan disebabkan target pendapatan yang terlalu tinggi, ketidakpastian ekonomi global dan nasional, dan kurangnya optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi, atau kendala

teknis dalam pengelolaan pendapatan. Pada tahun 2024 Penurunan kembali terjadi, meskipun secara nominal pendapatan masih tinggi penyebabnya karena kenaikan anggaran yang terlalu ambisius, Ketergantungan terhadap transfer pusat, serta faktor administrasi atau hambatan teknis dalam penarikan atau pencatatan pendapatan.

5.2.2 Analisis Rasio Serapan Anggaran Belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024

Analisis rasio serapan anggaran belanja menjadi satu diantara metode evaluasi yang dipergunakan dalam penilaian seberapa besar efektivitas pelaksanaan anggaran belanja dari total anggaran yang telah ditetapkan. Rasio ini mencerminkan kinerja keuangan suatu instansi dalam memanfaatkan dana publik secara efisien dan bertanggung jawab. Hasil analisis rasio serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi Tahun 2020-2024 yaitu:

**Tabel 5. 6 Analisis Rasio Serapan Anggaran Belanja BPKAD
Kota Jambi Tahun 2020-2024**

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kriteria
2020	1.826.930.849.781	1.665.932.584.837	91,19	CB
2021	1.961.694.919.058	1.740.357.878.019	88,72	KB
2022	1.812.832.658.629	1.622.747.432.178	89,51	KB
2023	1.863.794.648.856	1.720.255.456.671	92,30	CB
2024	1.928.586.899.927	1.800.252.368.262	93,35	CB

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

CB = Cukup Baik

KB = Kurang Baik

Sesuai dengan tabel 5.4, bisa diambil simpulan bahwasanya tingkat serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi selama periode 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020, realisasi anggaran mencapai 91,19% yang dikategorikan cukup baik. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 88,72% dan 89,51% yang termasuk dalam kategori kurang baik. Meskipun demikian, saat tahun 2023 juga 2024 terjadi peningkatan kembali beserta capaian masing-masing senilai 92,30% dan 93,35% yang kembali masuk dalam kategori cukup baik. Secara

keseluruhan, meskipun terdapat dua tahun dengan kinerja kurang baik, BPKAD berhasil menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan anggaran belanjanya pada dua tahun terakhir, yang mencerminkan adanya upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan anggaran.

Perbedaan persentase rasio serapan anggaran belanja BPKAD Kota Jambi selama periode 2020–2024 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berdampak pada penurunan maupun kenaikan realisasi anggaran per tahun. Saat tahun 2020, rasio serapan hingga 91,19% dengan kategori cukup baik, yang mencerminkan pelaksanaan program kerja berjalan cukup optimal meskipun pada saat kondisi pandemi COVID-19. Namun, saat tahun 2021 terjadi penurunan menjadi 88,72% (kategori kurang baik), kemungkinan disebabkan oleh kendala administratif, penyesuaian kebijakan akibat dampak lanjutan pandemi, serta refocusing anggaran. Tahun 2022 masih menunjukkan kategori kurang baik dengan nilai 89,51%, yang dapat diakibatkan oleh proses pelaksanaan kegiatan yang belum maksimal dan adanya pergeseran prioritas belanja. Peningkatan terjadi pada tahun 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 92,30% dan 93,35% (kategori cukup baik), yang memperlihatkan terdapatnya perbaikan pada perencanaan maupun pelaksanaan anggaran, serta peningkatan kapasitas pelaksana kegiatan dalam menyerap anggaran secara lebih tepat waktu dan tepat sasaran.

5.2.3 Analisis Rasio Efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024

Analisis rasio efisiensi merupakan salah satu tolak ukur utama untuk mengukur tingkat efektivitas penggunaan anggaran oleh suatu instansi pemerintah, termasuk BPKAD. Rasio mengukur perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran yang sudah ditentukan, yang mencerminkan efisiensi maupun tidak efisien dalam pelaksanaan kegiatan

keuangan. Berikut hasil analisis rasio efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024:

Tabel 5. 7 Analisis Rasio Efisiensi BPKAD Kota Jambi tahun 2020-2024

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Realisasi Pendapatan (Rp)	%	Kriteria
2020	1.665.932.584.837	1.621.827.275.396	102,71	TE
2021	1.740.357.878.019	1.652.948.449.754	105,28	TE
2022	1.622.747.432.178	1.668.797.755.118	97,24	KE
2023	1.720.255.456.671	1.662.743.583.686	103,45	TE
2024	1.800.252.368.262	1.765.182.353.921	101,98	TE

Sumber: Data diolah oleh peneliti (2025)

Keterangan :

TE : Tidak Efisien

KE : Kurang Efisien

Sesuai dengan tabel 5.5 bisa diambil simpulan bahwasanya tingkat efisiensi anggaran belanja pada BPKAD Kota Jambi selama periode 2020–2024 menunjukkan hasil yang kurang optimal. Pada tahun 2020, 2022, 2023, dan 2024, rasio efisiensi berada pada angka 100% atau lebih, yang mengindikasikan bahwa realisasi anggaran melebihi atau setara dengan anggaran yang telah ditetapkan, sehingga masuk pada kategori tidak efisien. hanya saat tahun 2021, rasio efisiensi mencapai 97,24%, yang tergolong kurang efisien. Perihal tersebut memperlihatkan bahwasanya sepanjang lima tahun belakangan, pengelolaan anggaran belanja masih belum sepenuhnya efisien dan perlu evaluasi yang lebih mendalam agar alokasi dan pelaksanaan anggaran dapat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan prinsip efisiensi anggaran pemerintah daerah.

Penyebab terjadi nya penurunan dan keikan pada rasio efisiensi belanja terhadap pendapatan mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024, yang mencerminkan adanya dinamika dalam pengelolaan anggaran daerah. Pada tahun 2020, rasio efisiensi tercatat sebesar 102,71% dan dikategorikan tidak efisien, yang disebabkan oleh tingginya realisasi belanja dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh, terutama karena pengeluaran mendesak

dalam penanganan pandemi COVID-19. Tahun 2021 mengalami kenaikan rasio menjadi 105,28%, masih dalam kategori tidak efisien, yang dipengaruhi oleh percepatan program pemulihan ekonomi daerah dan peningkatan belanja operasional serta belanja langsung untuk pelayanan publik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan signifikan pada rasio efisiensi menjadi 97,24%, yang menunjukkan perbaikan kinerja fiskal meskipun masih tergolong kurang efisien. Penurunan ini disebabkan oleh pengendalian belanja dan peningkatan efektivitas penggunaan anggaran, di mana belanja dapat ditekan lebih rendah dibandingkan pendapatan yang berhasil dikumpulkan. Pada tahun 2023, rasio kembali naik ke angka 103,45% dan masuk kategori tidak efisien, yang disebabkan oleh peningkatan belanja menjelang akhir tahun anggaran, termasuk untuk belanja modal dan kegiatan strategis. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dengan rasio efisiensi sebesar 101,98%, namun masih tergolong tidak efisien karena realisasi belanja tetap lebih tinggi dibandingkan pendapatan, yang kemungkinan besar disebabkan oleh belanja prioritas seperti proyek pembangunan dan peningkatan sistem layanan keuangan daerah.

5.3 Analisis Ekonomi

Dalam perspektif ekonomi daerah, anggaran yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jambi tidak hanya berfungsi sebagai alat administrasi fiskal, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara efisien dan efektif memberikan dampak langsung terhadap dinamika ekonomi, khususnya dalam meningkatkan daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas fiskal daerah.

Selama periode 2020 hingga 2024, realisasi anggaran belanja BPKAD menunjukkan tren yang relatif stabil, meskipun disertai dengan fluktuasi tingkat efisiensi. Pada awal pandemi COVID-19 tahun 2020, belanja pemerintah daerah menjadi penopang utama pergerakan ekonomi, di tengah menurunnya aktivitas sektor swasta. Realisasi belanja yang tinggi pada tahun

tersebut terbukti mampu menjaga keberlangsungan program-program pelayanan publik dan pemulihan ekonomi lokal, seperti program bantuan sosial, pengadaan alat kesehatan, serta stimulus bagi pelaku UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa belanja pemerintah daerah memiliki peran dalam menjaga stabilitas makroekonomi di level lokal.

Memasuki tahun 2021 hingga 2022, meskipun terjadi peningkatan pada sisi pendapatan dan stabilitas serapan anggaran, rasio efisiensi menunjukkan ketidakseimbangan antara belanja dan pendapatan. Tidak efisien ini, yang tercermin dari rasio efisiensi di atas 100%, mengindikasikan bahwa belanja yang dilakukan masih belum sebanding dengan pendapatan yang diperoleh, sehingga memunculkan potensi ketergantungan terhadap pembiayaan defisit atau pengeluaran yang tidak memberikan nilai tambah ekonomi secara optimal. Dalam konteks ekonomi, hal ini dapat menyebabkan alokasi sumber daya publik menjadi kurang produktif.

Namun demikian, peran BPKAD dalam menjaga kesinambungan fiskal tetap terlihat dari upaya peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan dana transfer pusat secara tepat guna, serta pengendalian belanja yang lebih disiplin pada tahun-tahun berikutnya. Di tahun 2023 dan 2024, peningkatan persentase realisasi belanja yang diimbangi dengan perencanaan anggaran yang lebih realistis memberikan sinyal positif terhadap kestabilan fiskal daerah. Ini tercermin dari meningkatnya penyerapan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan strategis seperti pembangunan infrastruktur dasar, digitalisasi layanan keuangan, dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Namun demikian, untuk mencapai kinerja ekonomi daerah yang lebih optimal, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur anggaran yang ada.

Rasio efisiensi yang cenderung berada di atas ambang batas ideal menunjukkan adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas belanja, bukan hanya kuantitasnya. Alokasi anggaran hendaknya lebih diarahkan kepada program-program prioritas yang mampu memberikan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pendidikan

vokasional, dan infrastruktur pendukung konektivitas antar wilayah. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, BPKAD Kota Jambi diharapkan mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pada awal periode, kinerja pendapatan menunjukkan pencapaian yang sangat baik, namun pada tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan secara bertahap. Begitu pula dengan realisasi belanja yang mengalami dinamika, di mana pada beberapa tahun pelaksanaannya cukup baik, sementara di tahun lainnya belum sepenuhnya mencapai target yang direncanakan. Ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi ini menandakan bahwa masih terdapat ruang perbaikan dalam hal akurasi perencanaan, pengendalian pelaksanaan, serta respons terhadap dinamika ekonomi dan kebijakan yang berlaku.
2. Rasio efektivitas secara umum menunjukkan hasil yang cukup baik, mencerminkan bahwa pendapatan yang direncanakan hampir selalu tercapai. Rasio serapan anggaran belanja juga menunjukkan capaian yang relatif stabil, meskipun belum mencapai kategori yang sangat baik. Namun, rasio efisiensi menjadi catatan penting karena dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tingkat penggunaan anggaran yang melebihi batas efisiensi, yang berarti anggaran dikelola kurang hemat dan perlu dilakukan penyesuaian. Hal ini mencerminkan perlunya peningkatan dalam manajemen pengeluaran agar penggunaan anggaran dapat lebih optimal, sesuai kebutuhan riil, dan tidak terjadi pemborosan.

6.2 Saran

Mengacu pada kesimpulan yang telah diperoleh, penulis menyampaikan sejumlah saran berikut:

1. Pemerintah khususnya BPKAD perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih akurat dan realistis, serta ditopang oleh sistem pengawasan pelaksanaan anggaran yang ketat. Hal ini penting agar belanja dan pendapatan yang direncanakan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Evaluasi menyeluruh terhadap faktor penyebab ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi perlu dilakukan secara rutin, khususnya pada belanja yang cenderung tidak efisien.
2. Pemerintah daerah khususnya BPKAD perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan, serta memperkuat integrasi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Langkah hal ini dimaksudkan agar dapat memastikan bahwa setiap alokasi anggaran digunakan secara optimal, tepat sasaran, serta berperan dalam mewujudkan prioritas pembangunan daerah dan pelayanan publik secara berkelanjutan
3. Dalam penelitian ini mencakup perlunya pengembangan variabel dan indikator yang lebih luas, seperti menambahkan rasio keserasian, rasio pertumbuhan, dan kemandirian fiskal untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh terhadap kinerja anggaran. Selain itu, disarankan agar penelitian selanjutnya menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods*) dengan menggabungkan analisis kuantitatif dan wawancara kualitatif guna mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait penyebab fluktuasi kinerja anggaran. Rentang waktu penelitian juga sebaiknya diperpanjang agar tren jangka panjang dapat dianalisis dengan lebih baik, serta cakupan wilayah dapat diperluas ke SKPD lain untuk tujuan komparatif. Penggunaan teknik statistik lanjutan seperti regresi atau analisis korelasi juga disarankan untuk menguji pengaruh antar variabel secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- April, P., Akuntansi, J. R., Purnomo, B. S., & Putri, C. (2018). Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan dan Kinerja Anggaran *Berkonsep Value For Money*. *Akuntabilitas, Transparansi, Pengawasan Dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money*, 6(3), 467–480. <https://doi.org/10.17509/jrak.v6i3.14886>
- Anggraeni, F., & Saleh, S. A. (2020). Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bandung) *The Influence of Performance Based Budget Implementation on Performance Accountability of Government*. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 36–44
- Angelia, A., Lubis, M. S., & Hartono, B. (2022). Analisis Implementasi Sistem Kinerja Anggaran Pada Bagian Umum Secretariat Daerah Kabupaten Batu Bara. *Perspektif*, 11(2), 809–820. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i2.6330>
- Ahmad Mustamir, Agus Hendrayadi, I. H. (2023). Teori Administrasi Publik Pengantar. In *Administrasi Negara Publik*.
- Cendra. (2025). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2021-2023. 11(2), 167–176.
- Dharmawan, M. Y., Latif, I. N., & Dewi, C. K. (2021). Evaluasi Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran Belanja (Studi Empiris Pada Kantor Pelayanan Pajak PratamaTenggarong Tahun 2016-2019). *Ekonomia*, 10(2), 207–215.
- Ginting, W., & Parwati, S. (2025). Analisis Anggaran Gaji Dan Tunjangan Untuk Menilai Kinerja KeuanganStudi Kasus: Kantor Kecamatan Bandung Kidul. *Jurnal Digitalisasi Akuntansi*, 2.
- Hadisaputra. (2021). Sang Pencerah - Sang Pencerah. Wikipedia, 465–475.
- Hutagaol, K. U. . S. S. B. . & G. M. C. (2023). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Toba. *Jurnal Skripsi Akuntansi*, 1(1), 88–95. <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N1.H88-95>
- Hesti Yulia Sabono, & Sahusilawane, W. (2024). Analisis Laporan Realisasi Anggaran dalam Mengukur Kinerja Keuangan Desa. *Journal of Student Research*, 2(1), 326–336. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.2647>
- Ilmiah, J., Manajemen, M., Ashari, M. I., & Kaukab, M. E. (2020). *JIMMBA*. 2(5), 728–740.
- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio

- Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- K, J. L., Aftitah, F. N., Hasanah, K., & Lailatul, N. hadi F. . (2025). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2023 Di DKI Jakarta. 3, 44–50.
- Kopong, A., Rantererung, C. L. R., & Lambe, K. H. (2025). Analisis Kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Di Inspektorat Provinsi Papua Tengah. 3.
- Manurung, K. M., & Mauliddina, F. (2021). Analisis Anggaran Kinerja Sektor Publik Pada Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Global Manajemen*, 10(2), 87. <https://doi.org/10.46930/global.v10i2.1813>
- Medindari, K. N. A. A., Arianto, H. Y., Wahyuni, C., & Mulyani, A. S. (2024). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Akuntansi*, 4(1), 63–72.
- Miharto, E., Wati, L. N., & Hendrian. (2025). Analisis Pengaruh Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Pengelolaan Anggaran di mediasi Pengendalian Anggaran (Studi Kasus pada UPT Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- Panimba, W., & Lintin, M. T. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tana Toraja Tana Toraja pada tahun 2019-2021 tidak mencapai target yang telah dianggarkan , sehingga Rasio efektivitas merupakan suatu kemampuan dalam menggambarkan pe. 1(2).
- Rahmah, R., Zuraida, Z., & Abdullah, S. (2017). Analisis Kinerja Anggaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 213–222. <https://doi.org/10.24815/jped.v3i2.8232>
- Ratu, V. M., & Adityaputra, S. A. (2015). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota bogor Tahun Anggaran 2019-2023. *Accountability*, 4(1), 131. <https://doi.org/10.32400/ja.8420.4.1.2015.131-139>
- Subianto, P. (2022). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah dalam Mendukung Pembangunan Kota Palangka Raya. *Edunomics Journal*, 3(1), 31–43.
- Susanto, H. (2019). Analisis Rasio Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Mataram. *Distribusi - Journal of Management and Business*, 7(1), 81–92. <https://doi.org/10.29303/distribusi.v7i1.67>

- Tamasoleng, A. (2025). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.872.237>
- Wenda, Y., Rares, J. J., & Kimbal, A. (2025). Analisis Kinerja Pemerintah Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua Pegunungan. *Journal of Agribusiness and Rural Development*, 7, 101–114.
- Widodo, A. A., Riyanti, D. A., Dani, F. R., Abdillah, M. E., & Siboro, S. F. (2025). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021-2023 Anggoro. 3.
- Wirawati, A., Fatimah, S., & Sujadi, S. (2023). 94-Article Text-504-1-10-20230930. *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 20–30.
- Zikriani, S. W., & Nurabiah. (2025). Analisis Kinerja Pemungutan Dan Strategi Optimalisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Lombok Tengah. <https://conference.uts.ac.id/index.php/SEMAI/article/download/816/519>

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JAMBI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Raya Jambi - Ma. Bulian KM 15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361
laman : <https://feb.unja.ac.id>

Nomor : 2232/UN21.5/PT.01.04/2025
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Jambi, 22 Mei 2025

Yth. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA JAMBI
Jl. Jend. Basuki Rahmat, Handil Jaya, Jelutung, Kota Jambi, Jambi 36129

Dengan hormat,
Sehubungan dengan penelitian tugas akhir/skripsi mahasiswa Program Studi Keuangan Daerah,
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi sebagai berikut:

Nama : SAYYED AHMAD NAFIZ
N I M : C0E021017
No. HP : 0895604275359
Judul Penelitian : ANALISIS KINERJA ANGGARAN SKPD PADA BADAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
(BPKAD) KOTA JAMBI

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa
tersebut untuk melaksanakan penelitian tugas akhir pada unit/instansi yang Bapak/Ibu pimpin yang
akan dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2025 s.d 26 Juni 2025.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerja Sama
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,



Dr. Candra Mustika, S.E., M.Si.
NIP 198305242006041002



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

LAPORAN BELANJA LANGKAHAN				LAPORAN BELANJA LANGKAHAN DAN BELANJA DAIRAH			
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2020 DAN 2019							
No	KEMASAN	Ref	Keterangan	Revisi	Revisi 2020	Revisi 2019	Revisi 2019
1	PENDAPATAN	5.1.1	PENDAPATAN ASLI DAIRAH				
2	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.102.000	216.948.948.102.000	216.948.948.102.000
3	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
4	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.2	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
5	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.3	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
6	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.4	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
7	Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1.5	Pendapatan Pajak Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	TRANSFER PENDAPATAN ASLI DAIRAH				
9	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
10	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.1	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
11	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.2	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
12	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.3	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
13	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.4	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
14	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.5	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
15	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.6	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
16	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.7	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
17	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.8	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
18	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.9	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
19	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.10	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
20	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.11	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
21	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.12	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
22	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.13	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
23	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.14	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
24	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.15	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
25	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.16	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
26	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.17	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
27	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.18	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
28	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.19	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
29	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.20	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
30	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.21	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948.948.948.000	216.948.948.948.000	216.948.948.948.000
31	Transfer Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.2.1.22	Transfer Pendapatan Asli Daerah		216.948		

NO	URAIAN	Ref	Anggaran 2020	Realisasi 2020	(%)	Realisasi 2019
53	JUMUJI TRANSFER		1.981.845.341,00	1.792.585.636,00	91,62%	836.172.397,00
54	JUMUJI TRANSFER		1.828.945.341.125,00	1.667.718.470.473,45	91,19%	1.661.563.904.180,83
55	SURPLUS (DIFFERENSI)	5.1.4	(211.176.919.411,00)	(45.808.195.077,06)	21,73%	38.179.995.661,23
56	PENYAIRAN	5.1.5				
57	PENYAIRAN DAKUAT	5.1.5.1	211.176.919.411,00	211.176.919.411,12	100,00%	172.524.144.899,89
58	Penggunaan SIPA		0,00	266.690,00	0,00%	73.468.830,00
59	Korupsi Kesalahan Pembulatan Tahun Sebelumnya					
60	Jumlah Penyerahan		211.176.919.411,00	211.177.186.101,12	100,00%	172.998.013.429,99
61	PENGELUARAN PEMBIAYAN	5.1.5.2				
62	Pengeluaran Modal Pembiayaan Daerah		0,00	0,00	0,00%	0,00
63	Pengeluaran Utang Kepada Pihak Asing		0,00	0,00	0,00%	0,00
64	Jumlah Pengeluaran		0,00	0,00	0,00%	0,00
65	PEMBAYARAN NETTO		211.176.919.411,00	211.177.186.101,12	100,00%	172.998.013.429,99
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran			165.268.991.024,06		211.176.919.411,12

WALI KOTA JAMBI,


Dr. IL SYARIF FASHA, ME

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PEMERINTAH KOTA JAMBI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

NO	URAIAN	Ref.	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
53	JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	0,00	1.782.885.636,00
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.561.694.919,68	1.740.357.878,01	85,72	1.667.715.176,47
55	SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.1	300.248.991,02	187.409.248,65	28,92	465.888.195,07
56	PENBIAYAAN	5.1.5	165.288.991,02	165.288.991,02	100,00	211.103.317,25
57	PENERIMAAN DAERAH	5.1.5.1	0,00	685.450.399,53	0,00	73.668.850,00
58	Penggunaan SLP		140.000.000,00	83.113.644,93	59,37	0,00
59	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
60	Penerimaan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00	0,00	0,00
61	Jumlah Penerimaan		305.288.991,02	249.088.085,42	81,59	211.177.166,10
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.5.2	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
63	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
64	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00	0,00	0,00
65	Jumlah Pengeluaran		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	100,00	0,00
66	PENBIAYAAN NETTO		305.288.991,02	249.088.085,42	81,47	211.177.166,10
67	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran		-	158.678.671,58	-	165.888.991,02

WALI KOTA JAMBI,

[Signature]
Tyo-errif FASHA, ME

NO	URAIAN	Ref.	Anggaran 2021	Realisasi 2021	(%)	Realisasi 2020
1	PENDAPATAN	5.1.1	297.849.650,00	264.774.978,00	89,25	216.961.981,30
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	297.849.650,00	264.774.978,00	89,25	216.961.981,30
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	55.312.000,00	51.844.248,00	93,73	50.000.000,00
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.602.257,38	9.618.775,82	100,38	9.602.257,38
6	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	91.235.666,85	78.525.627,45	86,07	88.609.972,45
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5.1.1.1)	5.1.1.1	156.150.924,00	139.368.091,27	89,28	138.612.979,75
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	45.000.000,00	384.786.645,79	85,51	355.678.810,40
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERMBAHAN	5.1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	62.554.888,00	100.837.135,45	161,20	62.551.911,03
11	Dana Bagi Hasil Sumbangan Dana Alam	5.1.1.2.1.2	23.915.211,46	41.669.611,11	174,24	37.368.239,96
12	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	675.238.711,00	675.238.711,00	99,99	675.238.711,00
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (5.1.1.2)	5.1.1.2	698.768.810,00	1.025.905.457,56	146,83	1.354.446.874,99
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	40.515.528,00	45.515.528,00	113,59	37.746.649,00
16	Dana Perimbangan	5.1.1.2.2.1	40.515.528,00	45.515.528,00	113,59	37.746.649,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat Lainnya	5.1.1.2.2	40.515.528,00	45.515.528,00	113,59	37.746.649,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	111.216.579,00	131.885.348,95	118,58	115.017.774,96
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	111.216.579,00	131.885.348,95	118,58	115.017.774,96
20	Pendapatan Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.1.2.3.2	3.720.000,00	3.720.000,00	100,00	3.720.000,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (5.1.1.2.3)	5.1.1.2.3	114.936.579,00	135.605.348,95	117,98	118.738.774,96
23	Total Pendapatan Transfer		1.454.210.912,00	1.407.449.754,68	96,85	1.372.846.874,99
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3	1.000.000.000,00	702.902.362,22	70,29	73.208.687,46
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	1.000.000.000,00	702.902.362,22	70,29	73.208.687,46
26	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.1	1.000.000.000,00	702.902.362,22	70,29	73.208.687,46
27	Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah (25 s.d 26)	5.1.1.3	1.000.000.000,00	702.902.362,22	70,29	73.208.687,46
28	JUMLAH PENDAPATAN	5.1.2	1.658.859.652,00	1.652.944.440,75	99,67	1.621.837.275,96
29	BELANJA	5.1.2	1.658.859.652,00	1.652.944.440,75	99,67	1.621.837.275,96
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	745.627.187,97	682.947.098,34	91,73	628.395.170,42
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	503.165.959,85	503.165.959,85	100,00	503.165.959,85
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	184.466.553,46	159.133.484,11	86,32	129.545.897,61
33	Belanja Hibah	5.1.2.1.3	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	0,00
34	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	197.820.000,00	197.820.000,00	100,00	0,00
35	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	47.914.897,57	43.843.156,23	91,46	18.103.901,01
36	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Jumlah Belanja Operasi (31 s.d 36)	5.1.2.1	1.388.617.509,89	1.319.985.416,25	95,03	1.180.545.959,53
38	BELANJA MODAL	5.1.2.2	942.760.000,00	942.760.000,00	99,99	6.880.000,00
39	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	942.760.000,00	942.760.000,00	99,99	6.880.000,00
40	Belanja Gedung dan Meub	5.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	159.133.484,11	159.133.484,11	100,00	129.545.897,61
42	Belanja Jalan, Energi dan Jaringan	5.1.2.2.4	233.370.339,07	233.370.339,07	100,00	169.600.168,91
43	Belanja Alat Transportasi	5.1.2.2.5	12.888.714,97	12.888.714,97	99,41	16.878.760,16
44	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Jumlah Belanja Modal (39 s.d 44)	5.1.2.2	564.662.178,54	495.885.725,08	87,84	444.351.871,53
46	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	10.415.331,03	5.699.564,29	54,72	41.044.082,13
47	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	10.415.331,03	5.699.564,29	54,72	41.044.082,13
48	Jumlah Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3	10.415.331,03	5.699.564,29	54,72	41.044.082,13
49	JUMLAH BELANJA		1.669.284.983,03	1.664.399.610,03	99,65	1.669.284.983,03
50	TRANSFER	5.1.3	0,00	0,00	0,00	1.782.885.636,00
51	Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	1.782.885.636,00
52	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3	0,00	0,00	0,00	1.782.885.636,00



WALLKOTA JAMBI.

WALLKOTA JAMBI.

WALLKOTA JAMBI.

6. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pemerintah Kota Jambi
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (%)	REALISASI 2022
53	JUMLAH TRANSFER		0,00	0,00	100.000.000,00
54	JUMLAH BELANJA dan TRANSFER (48+53)		1.863.794.648.856,00	92,30	1.022.847.432.178,57
55	SURPLUS DEFISIT (27-54)	5.1.1.4	(108.042.742.567,00)	(57,51) 87,98	45.950.323.800,23
56	PEMBAYARAN	5.1.1.5			150.678.657.158,49
57	PENERIMAAN DAIWAH	5.1.1.1	188.042.742.567,00	100,00	4.666.400,00
58	Penggunaan SLUPA	5.1.1.2	0,00	0,00	45.950.323.800,23
59	Kesekeluhan Pembukaan Tahun Sebelumnya	5.1.1.3	44.064.406,00	0,00	315.092.410.627,40
60	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.1.4	188.042.742.567,00	100,00	315.092.410.627,40
61	Jumlah Pembiayaan (58 + 60)	5.1.1.5	188.042.742.567,00	100,00	315.092.410.627,40
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.1.2.1	10.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
63	Pembayaran Modal Pemerintah Daerah	5.1.1.2.1	10.000.000.000,00	100,00	3.000.000.000,00
64	Pembayaran Pinjaman Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.1.2.2	70.000.000.000,00	97,80	70.000.000.000,00
65	Jumlah Pengeluaran (63 + 64)	5.1.1.2	80.000.000.000,00	98,80	73.000.000.000,00
66	PEMBAYARAN NETTO (61-65)	5.1.1.3	108.042.742.567,00	101,41	142.092.410.627,40
67	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (55-66)	5.1.1.4	-	-	188.042.742.567,72

Jambi, Mei 2024

PJ. WALI KOTA JAMBI,

SRI PURWANINGSIH, S.H., M.A.P.

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023 (%)	REALISASI 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1.1	370.000.000.000,00	87,92	301.796.809.128,90
2	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	370.000.000.000,00	87,92	301.796.809.128,90
3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	5.1.1.1.1.1	370.000.000.000,00	87,92	301.796.809.128,90
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	30.000.000.000,00	69,69	40.216.622.270,14
5	Pendapatan Lain-lain Pajak Daerah	5.1.1.1.3	30.000.000.000,00	69,69	40.216.622.270,14
6	Pendapatan Hibah	5.1.1.1.4	100.000.000.000,00	70,27	88.483.525.453,56
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (1+4+6)	5.1.1.1	500.000.000.000,00	82,35	430.702.956.388,60
8	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
9	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DAERAH PERMIBANGAN	5.1.1.2.1	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
10	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
11	Dana Bagi Hasil Sumbah Daya Alam	5.1.1.2.1.2	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
12	Dana Bagi Hasil Sumbah Energi	5.1.1.2.1.3	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
13	Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	75.000.000.000,00	99,92	77.079.008.732,90
14	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10+11+12+13)	5.1.1.2	300.000.000.000,00	99,94	300.000.000.000,00
15	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
16	Dana Perimbangan	5.1.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00
17	Jumlah Pendapatan Transfer Pusat-Lainnya	5.1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
18	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.3	156.800.000.000,00	100,00	140.777.077.144,90
19	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	156.800.000.000,00	100,00	140.777.077.144,90
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.2	0,00	0,00	0,00
21	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dan Pemertintah Provinsi	5.1.1.2.3.3	0,00	0,00	0,00
22	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19+21)	5.1.1.2.3	156.800.000.000,00	100,00	140.777.077.144,90
23	Total Pendapatan Transfer (14+17+22)	5.1.1.3	456.800.000.000,00	99,97	440.777.077.144,90
24	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00
25	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
26	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (24+25)	5.1.1.3	0,00	0,00	0,00
27	JUMLAH PENDAPATAN (17+23+26)	5.1.2	1.555.500.000.000,00	94,30	1.668.507.556.118,20
28	BELANJA	5.1.2.1	750.000.000.000,00	89,97	673.648.310.579,30
29	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	750.000.000.000,00	89,97	673.648.310.579,30
30	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.1	750.000.000.000,00	89,97	673.648.310.579,30
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.2	0,00	0,00	0,00
32	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.3	0,00	0,00	0,00
33	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.4	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.5	0,00	0,00	0,00
35	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.6	0,00	0,00	0,00
36	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1.7	0,00	0,00	0,00
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2	0,00	0,00	0,00
38	Belanja Modal	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00
39	Belanja Modal	5.1.2.2.1.1	0,00	0,00	0,00
40	Belanja Modal	5.1.2.2.1.2	0,00	0,00	0,00
41	Belanja Modal	5.1.2.2.1.3	0,00	0,00	0,00
42	Belanja Modal	5.1.2.2.1.4	0,00	0,00	0,00
43	Belanja Modal	5.1.2.2.1.5	0,00	0,00	0,00
44	Belanja Modal	5.1.2.2.1.6	0,00	0,00	0,00
45	Belanja Modal	5.1.2.2.1.7	0,00	0,00	0,00
46	Belanja Modal	5.1.2.2.1.8	0,00	0,00	0,00
47	Belanja Modal	5.1.2.2.1.9	0,00	0,00	0,00
48	JUMLAH BELANJA (28+44+47)	5.1.3	750.000.000.000,00	89,97	673.648.310.579,30
49	TRANSFER	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.1.1.1	0,00	0,00	0,00
52	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan	5.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Pemerintah Kota Jambi
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMA DENGAN 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (%)	REALISASI 2023 (dalam rupiah)
1	PENDAPATAN	5.1.1	545.000.000,00		
2	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1	330.000.000,00	99,97	329.296.715,240,00
3	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	5.1.1.1.1	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
4	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	5.1.1.1.2	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
5	Pendapatan Pajak Penghasilan	5.1.1.1.3	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
6	Pendapatan Pajak Rokok	5.1.1.1.4	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
7	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.5	73.000.000,00	97,15	71.160.532,340,00
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (5.1.1)		508.000.000,00	97,15	496.466.646,579,94
9	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.2	18.000.000,00		
10	Pendapatan Transfer Pusat - Dana Perimbangan	5.1.2.1	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
11	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.2.1.1	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	5.1.2.1.2	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
13	Dana Alokasi Umum	5.1.2.1.3	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
14	Dana Alokasi Khusus	5.1.2.1.4	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (10 s.d. 13)		18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
16	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	5.1.2.2	18.000.000,00		
17	Dana Transfer	5.1.2.2.1	18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
18	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Lainnya		18.000.000,00	100,00	17.999.999,999,00
19	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.2.3	18.000.000,00		
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.1	18.000.000,00	99,96	156.810.634,310,00
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.2.3.2	18.000.000,00	99,96	156.810.634,310,00
22	Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi	5.1.2.3.3	18.000.000,00	35,24	7.350.000.000,00
23	Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi (19 s.d. 21)		18.000.000,00	98,41	164.160.634,310,00
24	Total Pendapatan Transfer (14 s.d. 23)		1.308.000.000,00	95,40	1.314.255.897,440,00
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.3	1.488.000.000,00		
26	Pendapatan Hibah	5.1.3.1	1.488.000.000,00	99,92	27.133.752,30
27	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah (25 s.d. 26)		1.488.000.000,00	99,92	27.133.752,30
28	JUMLAH PENDAPATAN (17 s.d. 26)		1.896.554.704,930,00	95,37	1.662.745.582,682,24
29	BELANJA	5.1.2			
30	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	750.000.000,00	94,94	633.646.621.081,25
31	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	535.550.000,00	89,61	542.091.984.444,00
32	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	135.800.000,00	99,99	135.799.999,999,00
33	Belanja Perjalanan Dinas	5.1.2.1.3	135.800.000,00	99,99	135.799.999,999,00
34	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	135.800.000,00	99,99	135.799.999,999,00
35	Belanja Sosial	5.1.2.1.5	135.800.000,00	99,99	135.799.999,999,00
36	Jumlah Belanja Operasi (31 s.d. 36)		1.308.000.000,00	95,15	1.168.235.790,00
37	BELANJA MODAL	5.1.2.2	1.488.000.000,00		
38	Belanja Tanah	5.1.2.2.1	1.488.000.000,00	55,72	8.320.300.000,00
39	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.2	1.488.000.000,00	24,24	3.600.000.000,00
40	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.3	1.488.000.000,00	97,61	14.010.000.375,00
41	Belanja Peralatan dan Meubel	5.1.2.2.4	1.488.000.000,00	98,56	151.582.027.500,00
42	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	14.865.000,00	100,00	13.049.755.790,00
43	Belanja Aset Lainnya	5.1.2.2.6	100.000.000,00	95,32	95.320.000,00
44	Jumlah Belanja Modal (37 s.d. 44)		1.688.000.000,00	97,14	1.605.396.183.180,00
45	BELANJA TAK TERDIFUSIA	5.1.3			
46	Belanja Tak Terdifus	5.1.3.1	1.488.000.000,00	11,30	168.000.000,00
47	Jumlah Belanja Tak Terdifus		1.488.000.000,00	11,30	168.000.000,00
48	JUMLAH BELANJA (36 s.d. 47)		1.896.554.704,930,00	93,35	1.778.135.646,672,24
49	TRANSFER	5.1.3			
50	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.1	1.488.000.000,00	0,00	0,00
51	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	5.1.3.1.1	1.488.000.000,00	0,00	0,00
52	Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		1.488.000.000,00	0,00	0,00

CS Diposkan dengan Confidential

NO	URAIAN	REF	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024 (%)	REALISASI 2023
53	JUMLAH TRANSFER				
54	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (48 s.d. 52)		1.896.554.704,930,00	93,35	1.778.135.646,672,24
55	SURPLUS/DEFISIT (51 s.d. 54)	5.1.4	(43.000.134.900,00)	81,40	(27.511.877.586,00)
56	PENYALINAN	5.1.5			
57	Penggunaan Salina	5.1.5.1	52.000.000,00	100,00	18.847.745.567,70
58	Kerangka Kebutuhan Penjualan Tahun Sebelumnya	5.1.5.1.1	52.000.000,00	100,00	18.847.745.567,70
59	Pembiayaan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.5.1.2	472.865.150,00	0,00	44.000.000,00
60	Pembiayaan Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	5.1.5.1.3	472.865.150,00	0,00	44.000.000,00
61	Jumlah Pembiayaan (56 s.d. 60)		52.000.000,00	100,00	18.847.745.567,70
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.6			
63	Pembiayaan Peralihan	5.1.6.1	10.000.000.000,00	50,00	10.000.000.000,00
64	Pembiayaan Peralihan	5.1.6.1.1	10.000.000.000,00	50,00	10.000.000.000,00
65	Jumlah Pengeluaran (63 s.d. 64)		10.000.000.000,00	50,00	10.000.000.000,00
66	PEMBAYARAN NETTO (61 s.d. 65)		47.500.000.000,00	11,47	10.547.745.567,70
67	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (55 s.d. 66)		-	-	52.000.000.000,00

Dr. dr. H. MAJANA, M.K.M.

CS Diposkan dengan Confidential

Lampiran 3 Dokumentasi Selama Penelitian



